

ISSN online 2723-0996

pISSN:2622-4763



JPPKn

Jurnal Pendidikan **PANCASILA** dan **KEWARGANEGARAAN**

Volume 2 Nomor 1 April 2021



Diterbitkan oleh:
Program Studi PPKn
Universitas Tanjungpura

Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JPPKn) Volume 2 Nomor 1 April 2021



ISSN online 2723-0996

pISSN:2622-4763



JPPKn

Jurnal Pendidikan **PANCASILA** dan **KEWARGANEGARAAN**

Volume 2 Nomor 1 April 2021



Diterbitkan oleh:
Program Studi PPKn
Universitas Tanjungpura

Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JPPKn)

Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (JPPKn) dengan ISSN 2723-0996 dan merupakan jurnal *Peer-Review* yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (JPPKn) bertujuan untuk mendesiminasikan pemikiran konseptual atau ide, review, dan hasil penelitian terkait Pancasila dan Kewarganegaraan.

Diterbitkan oleh:

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Tanjungpura

Alamat Penerbit:

Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Kalimantan Barat, Kotak Pos: 78124

Telp : 0561(740144)

Hp : 089681943104

Email : jppkn@fkip.untan.ac.id

Website : <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPPKn>

Pimpinan Redaksi

Jagad Aditya Dewantara, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

Dewan Penyunting

Prof. Maswardi H. Amin, M.Pd, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Prof. Dr. Yohanes Bahari, M.Pd., Universitas Tanjungpura, Indonesia

Dr. Sulistyarini, M.Si, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Dr. Wina Nurhayati Praja, M.Pd, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Dr. Hema Fitria, M.Pd, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak

Efriani, M.Ant, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Wibowo Heru Prasetyo, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Obby Taufik Hidayat, M.Pd, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Penyunting Pelaksana

Drs. Rum Rasyid, MM, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Thomy Sastra Atmaja, SH., M.Pd, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Shilmy Purnama, M.Pd, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Mitra Bestari

Prof. Dr. Dasim Budimansyah, S.Pd., M.Si, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Prof. Dr. Sapriya, M.Ed, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Prof. Dr. Suyahmo, M.Si, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.Ip., M.Si., M.H., Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Dr. Mukhamad Murdiono, S. Pd., M.Pd., Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Indonesia

Dr. Muhajir, S.Pd., M.Pd, University of Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Dr. Epin Saepudin, M.Pd, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JPPKn) Volume 2 Nomor 1 pada bulan April 2021.

Pada penerbitan ini disajikan lima artikel ilmiah yang terdiri dari (1) Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Budaya di Sekolah, (2) Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Model Pembelajaran PPKn Melalui Pendekatan Komprehensif, (4) Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas, dan (5) Analisis Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar.

Akhir kata kami mengucapkan selamat membaca dan semoga membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pembaca. Besar harapan kami akan kritik dan saran dari pembaca demi pengembangan pada penerbitan selanjutnya.

Pontianak, April 2021

Pimpinan Redaksi

DAFTAR ISI

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI-NILAI BUDAYA DI SEKOLAH Dera Nugraha, Aan Hasanah	Halaman 1-9
PENELITIAN TINDAKAN KELAS DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN T Heru Nurgiansah, Febri Fajar Pratama, Aulia Solichah Iman Nurchotimah	10-23
MODEL PEMBELAJARAN PPKN MELALUI PENDEKATAN KOMPREHENSIF Intan Kusumawati, ahmad Nasir Ari Bowo, Joko Wahono	24-36
PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI DESA PERAPAKAN KABUPATEN SAMBAS Hemafitria Hemafitria, Fety Novianty Fety Novianty, Fitriani Fitriani	37-51
ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI SISTEM ZONASI TERHADAP PRESTASI BELAJAR Sulaiman sulaiman, Laila Nurfitriah Lubis, Rizky Aditya	52-65



PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI-NILAI BUDAYA DI SEKOLAH

Dera Nugraha^{1*}, Aan Hasanah²

¹UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

²UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

*nugrahaderal@gmail.com

ABSTRAK

Sikap spiritual dan sosial peserta didik saat ini terbukti belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari program penguatan pendidikan karakter. Artinya pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah perlu dievaluasi. Tulisan ini hadir untuk menekankan kembali urgensi nilai-nilai kebudayaan sebagai dasar pendidikan karakter di sekolah serta menghadirkan gagasan implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, mempelajari buku referensi, jurnal serta pengalaman penulis yang dirasakan dalam aktifitasnya di sekolah. Terlihat pendidikan karakter di sekolah belum secara serius menempatkan nilai-nilai budaya sebagai landasannya. Penguatan landasan tersebut diikuti dengan implementasi trilogi lembaga pendidikan dapat menjadi solusi peningkatan hasil pendidikan karakter di sekolah.

Kata Kunci: Budaya, karakter, nilai, pendidikan, sekolah

ABSTRACT

The current students' spiritual and social attitudes have proven to be incompatible with the goal of character education strengthening program. It shows that character education program implementation in school needs to be evaluated. This paper aims to remind the urgency of cultural values as the basic of character education program in schools and, to bring the idea of the ideal implementation form. Library research is the method used; analyzing reference books, journals and the author's experiences while working in schools. The result shown that character education program implementation in schools has not seriously put the cultural values as its foundation. Strengthening the cultural values as the foundation of character education program that is followed by the trilogy of educational institutions implementation could be an exit strategy to improve the character education program result in school.

Keywords: Character, culture, education, school, values

PENDAHULUAN

Tobroni (2018), mengutarakan bahwa cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan sosial tidak sepenuhnya kondusif bagi tujuan pendidikan. Telah banyak perilaku menyimpang peserta didik yang diakibatkan oleh serangan gencar narkoba, LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), ideologi ekstrim (radikal dan liberal).

Seperti menjadi pemandangan sehari-hari merebaknya ketidakjujuran, penurunan rasa hormat anak kepada orang tua dan guru, peningkatan tindak kekerasan dan pertengkaran dikalangan pelajar, peningkatan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, penurunan semangat belajar dan kedisiplinan, meningkatnya kebiasaan materialis dan hedonis pada pelajar, perluasan perilaku permisif (bebas). Beberapa kasus yang terjadi pada akhir-akhir ini di sekitar kita menunjukkan adanya krisis moral di kalangan peserta didik, antara lain; pesta miras di kalangan pelajar, tawuran antarpelajar, dan pelecehan seksual (Ghufron et al., 2017).

Kondisi tersebut diatas dapat menjadi salah satu indikator belum suksesnya program pendidikan karakter di sekolah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018) pada Satuan Pendidikan Formal.

Desain PPK adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Terutama nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan produk kebudayaan-kebudayaan bangsa Indonesia yang telah dikemas sedemikian rupa oleh para tokoh kemerdekaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka untuk keberhasilan penanaman nilai-nilai Pancasila tersebut kebudayaan perlu dijadikan salah satu landasan konsep, implementasi, dan evaluasi dari pendidikan karakter.

Kearifan budaya merupakan perekat identitas bangsa (Brata, 2016). Kebudayaan bahkan berkaitan erat dengan ketahanan suatu bangsa. Itulah diantara alasan mengapa kebudayaan perlu dijadikan sebagai salah satu landasan pendidikan karakter.

Diantara sebab belum suksesnya pendidikan karakter dewasa ini, sangat dimungkinkan karena pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya di sekolah belum dilaksanakan secara serius. Tulisan ini hadir untuk menekankan urgensi nilai-nilai kebudayaan sebagai nilai-nilai utama dalam pendidikan karakter, khususnya di sekolah, serta menghadirkan gagasan implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research*, yaitu dengan mempelajari dan menganalisa berbagai referensi, artikel jurnal, buku dan penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian. Selanjutnya dilengkapi dengan pengalaman penulis selama terlibat dalam pengelolaan/ pelatihan sekolah-sekolah di beberapa provinsi di Indonesia. Menurut Ansori (2019), studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Data diperoleh dari data yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu.

Pada penelitian ini peneliti melakukan beberapa tahapan dalam pengumpulan, analisis, dan penyajian data. Dimulai dengan mengumpulkan berbagai sumber, mengategorisasi sumber sesuai dengan struktur bahasan penelitian yang telah ditentukan, memilih informasi yang kredible, menganalisis konten dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan, selanjutnya diperkuat dengan wawancara kepada beberapa pengelola sekolah di beberapa provinsi sebagai data pelengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Budaya (*Cultural Value*)

Nilai adalah sesuatu konsep yang dianggap baik, penting, dan diharapkan oleh suatu anggota masyarakat tertentu yang menyepakatinya. Konsep tersebut menjadi tolok ukur benar-salah dan baik-buruknya suatu objek. Budaya menurut Budaya et al. (2013), merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat

dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat, unsur-unsur pembentukan tingkah laku didukung dan diteruskan oleh anggota dari masyarakat tertentu.

Nilai budaya berarti suatu konsep umum yang terorganisasi dan mempengaruhi perilaku masyarakat tertentu, yang berhubungan dengan korelasi manusia dengan lingkungan, pengetahuan, hukum, adat, serta diturunkan dari generasi ke generasi. Nilai budaya tersebut bisa diadopsi dan dimodifikasi pada komunitas tertentu untuk tujuan tertentu. Misalnya desain kebudayaan untuk komunitas terbatas di perusahaan dan sekolah, demi tujuan produktifitas dan pendidikan.

Kebudayaan yang dibentuk untuk anggota masyarakat tertentu atas dasar nilai-nilai budaya tertentu akan mempengaruhi tatanan perilaku anggotanya. Kebudayaan perusahaan akan mempengaruhi para pengelola dan pekerja didalamnya. Kebudayaan sekolah akan mempengaruhi warga sekolahnya, demikian seterusnya.

Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Budaya di Sekolah

Secara etimologi, bila ditelusuri dari asal katanya, kata karakter berasal bahasa Latin “kharakter”, “kharassein”, “kharax”, yang berarti membuat tajam dan membuat dalam. Secara terminologi, karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia. (Putry, 2019)

Suatu bangsa akan bisa mencapai taraf kemajuan dan tetap eksis dalam persaingan global apabila rakyatnya berkualitas Lickona (2012). Karakter merupakan puncak (kulminasi) dari sikap, perilaku, motivasi, dan skill individu (Battistich, 2008). (Taufik, 2014) Tanpa penguatan karakter, kemajuan suatu bangsa akan sulit terjadi. Karakter suatu bangsa itu sendiri merupakan turunan dari nilai-nilai kebudayaan yang dimilikinya.

Tidak mudah untuk menjaga dan melestarikan karakter budaya bangsa, hal itu disebabkan oleh terpaan budaya dari luar atau asing yang secara kasat mata mengandaikan kemewahan, dan kebebasan yang tak terkendali. (Idrus Ruslan, 2015) Karena tidak mudah, maka nilai-nilai budaya perlu ditanamkan secara serius melalui pendidikan karakter di sekolah.

Nilai-nilai budaya yang dibidik untuk ditanamkan melalui pendidikan karakter di sekolah antara lain religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

Sebagai contoh nyata saat ini, korupsi di Indonesia tidak menurun, malah sebaliknya. Tahun 2020 Indonesia berada pada skor 37 dengan rangking 102 dari 180 negara yang dilibatkan, turun tiga poin dari tahun 2019 (*Corruption Perception Index*). Lima besar negara dengan IPK tertinggi antara lain Denmark dan Selandia Baru (IPK 88); Finlandia, Singapura, Swedia dan Switzerland (85); Norwegia (84); Belanda (82); Jerman dan Luxembourg (80). (CNN Indonesia, 2021) Itu dapat menjadi salah satu bukti bahwa penanaman karakter peduli sosial dan tanggung jawab di sekolah belum berhasil. Oleh karena itu, pendidikan karakter dipandang sebagai solusi terbaik untuk mengatasi problem-problem bangsa Indonesia (Taufik, 2014).

Penanaman nilai-nilai karakter di sekolah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan dengan pengorganisasian budaya sekolah yang tertanam dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan standar operasional prosedur (SOP) kegiatannya. Dalam KTSP dan SOP tersusun fondasi nilai-nilai karakter berbasis budaya yang akan didorong oleh semua perangkat sekolah yang dimiliki. Guru menerjemahkannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Peserta didik memahami dan mengikuti program kegiatan yang dibuat secara aktif. Kepala sekolah dan tenaga kependidikan mendorong kelancaran operasional dan keberhasilan program. Model pendidikan karakter yang baik, meletakkan landasan nilai dalam visi satuan pendidikan, kemudian nilai-nilai inti karakter yang tertuang dalam visi disosialisasikan kepada warga besar satuan pendidikan, mereka kemudian membangun komitmen bersama untuk mewujudkan visi (Akbar, Sa'dun, Samawi, Ahmad, Arafik, Muh., Hidayah, 2014).

SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan,

tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan (Nugraha, 2018). SOP kegiatan sekolah disusun untuk menjaga stabilitas performa kerja komunitasnya. Sekolah secara terukur dapat menerjemahkan nilai-nilai budaya dalam bentuk-bentuk nyata kegiatan guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan yang diselenggarakannya.

Jika ketaatan beragama, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, dan nilai budaya lainnya belum menjadi bagian dari kesadaran peserta didik. Artinya pendidikan karakter berbasis nilai budaya di sekolah belum berhasil. Karena jika penanaman nilai budaya telah berhasil, maka nilai tersebut akan menjadi bagian dari karakter peserta didik. Dimana perilaku sesuai nilai budaya yang diharapkan akan muncul atas dasar kesadaran, bukan keterpaksaan karena aturan, atau ketertarikan atas penghargaan tertentu.

Lawrence Kohlberg (Nurhayati, 2006) membagi perkembangan karakter pada tiga tahapan; prakonvensional, konvensional, dan pascakonvensional. Prakonvensional adalah tingkat yang paling rendah. Penalaran moral dikendalikan oleh suatu penghindaran atas hukuman tertentu dari unsur eksternal. Konvensional adalah tahapan dimana seseorang melakukan sesuatu agar meraih legitimasi baik dari orang lain atau lingkungan masyarakat tertentu. Tahapan paling ideal adalah Pascakonvensional. Pada tahapan ini seseorang melakukan suatu kebaikan atas kesadaran mandiri secara internal yang terbangun dari nilai-nilai yang telah dimilikinya.

Atas dasar hal diatas, maka pembelajaran di sekolah baru dikatakan berhasil apabila mampu menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didiknya. Pembelajaran dikatakan berhasil manakala kegiatan yang berlangsung di sekolah itu mampu memfasilitasi peserta didik dalam proses *transfer of value* dalam konteks pembentukan karakter bangsa (*nation character building*) sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum resmi. (Ghufron et al., 2017) Fuad Hasan memandang bahwa tujuan dari pendidikan bermuara pada pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma social (*transmission of culture values and social norm*) (Putry, 2019).

Sekolah memiliki kesempatan yang besar untuk mencapai keberhasilan dalam penanaman nilai-nilai karakter. William Bener mengemukakan bahwa apa yang terekam dalam memori anak didik di sekolah, ternyata mempunyai pengaruh besar bagi kepribadian atau karakter mereka ketika dewasa kelak. Ringkasnya, sekolah merupakan

salah satu wahana efektif dalam internalisasi pendidikan karakter terhadap anak didik (Zulhijrah, 2017).

Namun demikian untuk keberhasilan pendidikan karakter pada peserta didik, sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Harus bersinergi antara strategi faktor internal dan eksternal sekolah. Strategi internal sekolah dapat dilakukan melalui empat pilar, yakni kegiatan proses belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya sekolah (*school culture*), kegiatan pembiasaan (*habituation*), kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler. Strategi eksternal dapat dilakukan melalui keluarga dan masyarakat (Maunah, 2016). Karakter seseorang akan terbentuk bila aktivitas dilakukan berulang-ulang secara rutin hingga menjadi suatu kebiasaan, yang akhirnya tidak hanya menjadi suatu kebiasaan saja tetapi sudah menjadi suatu karakter (Miftah Nurul Annisa, Ade Wiliyah, 2020).

KESIMPULAN

Pendidikan karakter adalah pendidikan dengan pendekatan *multy approaches*. (Fajrussalam & Hasanah, 2018) Pendidikan yang tidak hanya melibatkan guru dan peserta didik. Lebih dari itu, selain pihak sekolah, pendidikan karakter memerlukan kontribusi peran keluarga dan masyarakat. Tanpa kerjasama harmonis tripusat pendidikan tersebut, akan sulit pendidikan karakter dilaksanakan, termasuk pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya di sekolah.

Sejatinya sekolah membangun hubungan harmonis dengan komite sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar dalam kerangka mewujudkan layanan pendidikan yang optimal untuk para peserta didik. Dengan demikian peluang keberhasilan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya disekolah akan lebih besar.

Pendidikan karakter disekolah menjadi tumpuan pembentukan generasi bangsa Indonesia kedepannya. Apakah mereka akan mampu eksis bahkan bersaing dalam percaturan global atau tenggelam dalam persaingan lintas negara. Oleh karena itu, pendidikan karakter di sekolah yang berbasis nilai-nilai kebudayaan perlu terus dicermati, diperbaiki, dan dievaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Sa'dun, Samawi, Ahmad, Arafik, Muh., Hidayah, L. (2014). Model Pendidikan Karakter yang Baik di SD (Studi Lintas Situs Best Practices). *Jurnal Sekolah Dasar*, 23(2), 139–151.
- Ansori, Y. Z. (2019). Jurnal cakrawala pendas. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(2),

40–44.

- Brata, I. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa. *Jurnal Bakti Saraswati*, 5(1), 75588.
- Budaya, I. N., Lingkungan, D. A. N., & Haryanto, J. T. (2013). Implementasi Nilai-Nilai Budaya, Sosial, Dan Lingkungan Pengembangan Desa Wisata Di Provinsi Yogyakarta. *Jurnal Kawistara*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3957>
- CNN Indonesia. (2021). *Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180*.
- Fajrussalam, H., & Hasanah, A. (2018). Core Ethical Values of Character Education Based on Sundanese Culture Value. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 1(3), 15. <https://doi.org/10.31764/ijeca.v1i3.2126>
- Ghufron, A., Budiningsih, A., & Hidayati. (2017). model pembelajaran yang relevan digunakan untuk penanaman nilai-nilai budaya Yogyakarta adalah model pembelajaran non direktif versi Carl Rogers. *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(2), 309–319.
- Idrus Ruslan. (2015). Penguatan Ketahanan Budaya Dalam Menghadapi Derasnya Arus Budaya Asing. *Jurnal TAPIs*, 11(1).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Permendikbud RI No 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada satuan Pendidikan Formal*. 8–12.
- Maunah, B. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Kepribadian Holistik Siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1, 90–101. <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.8615>
- Miftah Nurul Annisa, Ade Wiliyah, N. R. (2020). Pentingnya Pendidikan Karakter pada Anak Sekolah Dasar di Zaman Serba Digital. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(1), 35–48.
- Nugraha, D. (2018). *Mengerti Sekolah Dengan Mudah* (1st ed.). Deepublish.
- Nurhayati, S. R. (2006). Telaah Kritis Terhadap Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg. *Paradigma: Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling*, 02, 93–104.
- Putry, R. (2019). Nilai Pendidikan Karakter Anak Di Sekolah Perspektif Kemendiknas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i1.4480>

- Taufik, T. (2014). Pendidikan Karakter di Sekolah: Pemahaman, Metode Penerapan, dan Peranan Tiga Elemen. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20(1), 59–65.
- Tobroni, dkk. (2018). *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam*. Prenadamedia Group.
- Zulhijrah. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 118–136.

PENELITIAN TINDAKAN KELAS DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

T Heru Nurgiansah^{1*}, Febri Fajar Pratama², Aulia Sholichah Iman Nurchotimah³

¹ Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Perjuangan, Tasikmalaya, Indonesia

³ Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, Indonesia

*nurgiansah@upy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian Tindakan Kelas dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan belajar. Guru yang profesional harus mampu mengaplikasikan beragam model dan media pembelajaran. Mayoritas siswa menganggap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah yang paling membosankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, literasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan yang melaksanakan penelitian tindakan kelas berhasil menyelesaikan permasalahan belajar seperti rendahnya motivasi dan prestasi siswa sekaligus memastikan bahwa penelitian tindakan kelas adalah solusi konkrit dalam menyelesaikan permasalahan belajar khususnya pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Pendidikan Kewarganegaraan

ABSTRACT

Class action research is conducted to solve learning problems. Professional teachers must be able to apply various models and learning media. The majority of students consider civic education subjects to be the most tedious. The purpose of this research is to know the successful research of class actions conducted by the teachers of citizenship education. This research uses qualitative methods. Data collection using observations, interviews, documentation, literacy. The results of this research show that the teachers of citizenship education who conduct class action research successfully solve learning problems such as low motivation and student achievement while ensuring that class action research is a concrete solution in the course of learning problems especially in citizenship education subjects

Keywords: *classroom action Research, citizenship education*

PENDAHULUAN

Belajar sepanjang hayat, itulah slogan yang terus menerus didegungkan banyak kalangan terutama praktisi akademis. Belajar dalam konteks pendidikan berarti adanya perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal pengetahuan dan perilaku. Pendidikan adalah investasi jangka panjang (Surbakti, 2018). Meskipun terasa pahit di awal dengan bersusah payah akan tetapi buahnya nanti terasa manis. Selain itu pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik (Fidarto, 2019). Dengan sumber daya manusia yang semakin baik dalam hal ini guru maka dunia pendidikan kita akan semakin maju dan mampu bersaing dengan negara manapun dalam pergaulan internasional.

Kegiatan belajar mengajar seperti kegiatan rutinitas (Suwastana, 2016). Baik guru maupun siswa selama lima sampai enam hari berada di lingkungan sekolah yang sama dan waktu yang sama pula. Rutinitas ini lambat laun akan membentuk suatu kebiasaan yang positif, seperti kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Teori Tabula Rasa atau kertas kosong menjabarkan bahwa setiap manusia yang terlahir tidak mempunyai pengetahuan apapun. Namun setelah mengenyam rutinitas belajar, kertas kosong tersebut menjadi penuh makna. Dengan demikian rutinitas belajar perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Belajar juga merupakan kegiatan yang harus mengalami sendiri (Subagyo, 2018). Hal ini akan membentuk pribadi masing-masing yang berbeda hasil dari pengalamannya terutama di lingkungan sekolah.

Salah satu mata pelajaran di sekolah yang diajarkan adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau disingkat PKn. Pkn merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dibelajarkan (Mardikayasa et al., 2015). Hal ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yang mewajibkan mata pelajaran PKn diajarkan di semua jenjang pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar bahkan sampai perguruan tinggi di seluruh wilayah nusantara.

Selain itu yang menjadi ciri khas dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai salah satu mata pelajaran yang pengusaannya menuntut siswa menghafal materi (Lukiyah, 2017). Materi-materi tersebut diantaranya aturan perundang-undangan, sosial politik, hukum ketatanegaraan, budaya dan ekonomi. Dengan materi yang sedemikian banyaknya tidak heran jika timbul permasalahan seperti rasa bosan yang berimbas pada minat belajar siswa, bahkan tak sedikit siswa yang

menganggap bahwa PKn adalah pelajaran yang sulit saking banyaknya materi yang harus dihapal sehingga berimbas pada prestasi belajar siswa yang rendah. Padahal PKn sebagai pendidikan nilai dan moral adalah mata pelajaran yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya sebagai hapalan materi yang cara penyampaiannya melalui indoktrinasi. mata pelajaran PKn sarat nilai dan norma sehingga ada asumsi mata pelajaran ini kurang menarik dan sering bersifat indoktrinasi (Rokanah, 2015).

Selain masalah minat belajar dan prestasi siswa dalam hal akademik khususnya pada mata pelajaran PKn, masalah yang terjadi di lapangan adalah motivasi siswa dalam pembelajaran PKn masih kurang (Farida Hasan Rahmaibu, Farid Ahmadi, 2017). Motivasi belajar siswa yang rendah ini bukan tanpa alasan. Selain materinya yang banyak seperti yang telah disampaikan sebelumnya, peran guru dalam penyampaian materinya pun perlu mendapat sorotan karena disinyalir sebagai salah satu faktor penyebabnya. Untuk itu diperlukan suatu cara agar siswa tertarik pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Syaparuddin et al., 2020). *In improving the learning of PKn, we need student learning interaction* (Nurgiansah, 2020). Artinya bahwa diperlukan interaksi antara guru dan siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PKn.

Guru memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembelajaran (Yulianingrum, 2014). Peran strategis itu diantaranya guru sebagai motivator yang memberikan motivasi dan semangat kepada siswanya untuk mau belajar dengan sungguh-sungguh. Siswa akan termotivasi jika melihat gurunya memiliki motivasi yang besar dalam mengajar guna mencerdaskan anak didik bangsa. Selain perannya sebagai motivator, guru pun harus menjadi fasilitator dalam artian memfasilitasi sarana dan prasana pembelajaran agar memiliki suasana yang baru dan menyenangkan seperti menggunakan teknologi. Perkembangan zaman mengharuskan guru untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensinya (Nurgiansah & Pringgowijoyo, 2020). Tidak hanya kompetensi pedagogiknya saja yang perlu ditingkatkan, tetapi kompetensi profesionalismenya pun harus terus diasah agar mampu menyesuaikan diri seiring perkembangan zaman dan perubahan karakteristik siswa dari tahun ke tahun. Selain itu guru juga bertugas sebagai pelatih dan pembimbing yang berarti memberikan keterampilan kepada siswa agar dapat bersaing (Nurgiansah & Sukmawati, 2020).

Seorang guru diharapkan mampu untuk bersikap fleksibel dalam mengatasi beragam persoalan (Nurgiansah, 2019). Persoalan dalam pembelajaran perlu dicari solusinya agar masalah dalam pembelajaran tidak terjadi terus menerus. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh guru dalam menyelesaikan permasalahan belajar adalah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian tindakan kelas yang lazimnya disingkat PTK adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan aturan-aturan tertentu untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu praktek pembelajaran (Noviana & Huda, 2018). Peningkatan mutu belajar bisa dilakukan manakala guru pun melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri apakah materi yang disampaikan sudah bisa dicerna oleh siswa seluruhnya atau justru baru sebagian bahkan tidak ada sama sekali. Semakin bagus mutu belajar dan mutu gurunya maka akan berimplikasi pada mutu sekolah khususnya dan mutu pendidikan pada umumnya.

Tujuan PTK sendiri adalah untuk meningkatkan dan/atau memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah (Sari, 2014). Perbaikan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PKn mutlak harus dilaksanakan salah satunya dengan PTK. Selain itu Penelitian Tindakan Kelas juga perlu ada panduan dan metodologi yang terarah (Susanti et al., 2015). Hal ini harus dilakukan agar pelaksanaan PTK tidak serta merta sebagai penggugur kewajiban saja akan tetapi PTK dijadikan kebutuhan guru dan siswa. Panduan dalam PTK dapat diberikan pada guru melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan lembaga kredibel atau oleh orang-orang yang ahli dibidangnya.

Namun demikian para guru menganggap melakukan PTK adalah pekerjaan yang sangat rumit dan sulit (Hodriani, 2015). Kesulitan ini didasari karena guru bingung dalam memilih metode dan media pembelajaran yang pas dan tepat dengan materi yang akan disampaikan. Sebagai contoh dalam materi PKn ada materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Jika materi ini disampaikan dengan metode ceramah saja maka akan membuat siswa merasa bosan. Tapi jika menggunakan metode yang tepat misalnya Role Playing atau bermain peran, niscaya siswa akan bersemangat karena dengan metode ini siswa akan terlibat langsung dalam materi misalnya siswa berperan sebagai aparat kepolisian, hakim, jaksa atau pengacara ketimbang guru hanya menjelaskan pengertian-pengertian dan tugas dari para aparat penegakan hukum. Selain itu guru juga perlu mengembangkan media dan model pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan

akan mampu menghilangkan rasa bosan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi optimal (Dewantara & Nurgiansah, 2021).

Berdasarkan persoalan diatas maka peneliti berasumsi bahwa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah masih terdapat banyak permasalahan dan diperlukan solusi untuk menyelesaikannya dengan cara melaksanakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru. *Teachers need to plan learning better* (Nurgiansah et al., 2020). Artinya guru perlu mempersiapkan pembelajaran lebih baik dari pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah upaya pengembangan penelitian tindakan kelas yang mutlak dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan segala persoalan belajar. Penelitian tindakan kelas ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak terutama di era globalisasi saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan (Taufiqillah, 2006). Dengan menggunakan sebuah pendekatan kualitatif, peneliti bisa fokus pada perhatian dan juga kejadian yang alamiah (Nurgiansah & Widyastuti, 2020). Dengan metode ini permasalahan dapat tergambarkan semurni-murninya sehingga memudahkan peneliti untuk menggambarkan permasalahan dan solusinya secara detail.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada guru-guru mata pelajaran PKn pada jenjang sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Wawancara pun dilakukan kepada beberapa siswa untuk mengetahui permasalahan sebenarnya yang dirasakan langsung oleh siswa. Jika menceritakan ke gurunya merasa sungkan bahkan takut, lain halnya kepada peneliti para siswa mencurahkan semua isi hati yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran PKn. Selain teknik wawancara, peneliti juga melaksanakan pengamatan langsung di salah satu sekolah di Yogyakarta mengenai pelaksanaan PTK pada mata pelajaran PKn. Teknik selanjutnya adalah domukentasi dan literasi. Literasi berisi kegiatan mencari referensi mengenai artikel terkait

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Tindakan Kelas merupakan solusi konkrit dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan belajar PKn. Secara umum dalam PTK seorang guru harus menentukan model pembelajaran yang akan digunakan. Beragam model pembelajaran yang bisa digunakan diantaranya, *Jigsaw*, *Picture and Picture*, *Problem Based Learning*. Pemilihan model pembelajaran dalam PTK harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dan disesuaikan dengan permasalahan yang akan dicari jalan keluarnya.

PTK sendiri biasanya dilaksanakan beberapa siklus sampai permasalahan belajar benar-benar dapat diatasi dengan baik. PTK yang berhasil ditandai dengan adanya perubahan dan peningkatan kualitas belajar. Jika pembelajaran PKn dirasakan begitu-begitu saja berarti pelaksanaan PTK belum optimal dan perlu penambahan siklus bahkan dengan mengganti model pembelajaran yang lebih relevan.

Dalam pembelajaran di kelas, guru harus menyiapkan perencanaan yang matang agar pelaksanaan pembelajaran menjadi efektif dan menghasilkan penilaian yang sempurna. Dalam perencanaan, guru mempersiapkan silabus, RPP, dan materi ajar. Persiapan ini bisa dilakukan sebelum ajaran baru dimulai agar bisa mengantisipasi kemungkinan masalah yang terjadi. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran PKn, guru membagi ke dalam 3 segmen, yakni kegiatan pendahuluan seperti mengucapkan salam, menanyakan kabar, mempersiapkan absensi siswa, dan memimpin berdoa. Lalu kegiatan inti yang ditandai dengan pembelajaran dua arah, guru memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan respon atas stimulus yang diberikan oleh guru. Dan ada segmen penutup berisi evaluasi guru terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi ini bisa berupa tanya jawab, pemberian tugas, atau pengerjaan lembar kerja siswa.

Hal terpenting dalam tahap pelaksanaan pembelajaran adalah pemilihan metode dan media yang tepat. Media pembelajaran dibuat sedemikian menarik agar berhasil memancing fokus siswa. Media pembelajaran yang menarik untuk dilihat dan enak didengar akan menambah motivasi belajar siswa, partisipasi siswa, dan keaktifan siswa. Indikator dari siswa yang termotivasi dapat dilihat dari jumlah kehadiran di kelas saat pelajaran PKn dan ketepatan waktu dalam memasuki kelas. Jika siswa kebanyakan terlambat masuk kelas dapat dipastikan siswa berusaha menghindari mata pelajaran PKn atau sekedar mengulur-ulur waktu. Dalam hal keaktifan siswa, dapat terlihat bagaimana respon dan

perilaku siswa seperti menjawab salam, mengajukan pertanyaan atau sekedar memberikan pendapat.

Beberapa masalah belajar PKn yang dialami siswa berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa siswa mengalami penurunan motivasi belajar karena rasa jenuh yang dihasilkan dari banyaknya materi. Lain halnya dengan hasil wawancara guru, mayoritas menjawab bahwa permasalahan yang paling umum adalah prestasi belajar hal ini terlihat dari hasil ulangan harian atau ujian akhir semester yang dilaksanakan menunjukkan nilai PKn siswa berada di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal.

Jika dilihat dari karakteristik PKn sendiri, mata pelajaran ini sangat berbeda dengan dengan mata pelajaran lainnya, Adapun aspek-aspek kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*). Menyangkut kemampuan kewarganegaraan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara terperinci materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasarkan hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan yang berbasis kepada ilmu politik, hukum, dan kewarganegaraan. Sehingga pendidikan kewarganegaraan menyajikan sejumlah fakta, konsep, generalisasi, dan teori-teori yang dikembangkan dari ilmu politik, hukum, dan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan hendaknya memperhatikan konsep-konsep kunci yang dikembangkan lebih lanjut dalam generalisasi dan teori.
- b. Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*). Keterampilan kewarganegaraan merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan kewarganegaraan meliputi kemampuan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*)

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajiban di bidang hukum, misalnya melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui. Rincian keterampilan kewarganegaraan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Keterampilan Kewarganegaraan

Keterampilan Intelektual	Keterampilan Partisipasi
1. Mengidentifikasi (menandai/ menunjukkan) dibedakan menjadi keterampilan: • Membedakan • Mengelompokan/ mengklasifikasikan • Menentukan bahwa sesuatu itu asli	1. Berinteraksi (termasuk berkomunikasi) terhadap objek yang berkaitan dengan masalah-masalah publik, yang termasuk dalam keterampilan ini, antara lain: • Bertanya, menjawab, berdiskusi dengan sopan santun • Menjelaskan artikulasi kepentingan • Membangun koalisi, negosiasi, kompromi • Mengelola konflik secara damai • Mencari konsensus
2. Menggambarkan (memberikan uraian/ ilustrasi) misalnya tentang: • Proses • Lembaga • Fungsi • Alat • Tujuan • Kualitas	
3. Menjelaskan (mengklarifikasi/ menafsirkan) misalnya tentang: • Sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa • Makna dan	2. Memantau/ memonitor masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan- persoalan publik. Yang termasuk keterampilan

pentingnya peristiwa atau ide • Alasan bertindak 4. Menganalisis misalnya tentang kemampuan menguraikan: • Unsur-unsur atau komponen-komponen ide (gagasan), proses politik, institusi-institusi • Konsekuensi dari ide, proses politik, institusi-institusi • Memilah mana yang merupakan cara dengan tujuan, mana yang merupakan fakta dan pendapat, mana yang merupakan tanggung jawab pribadi dan mana yang merupakan tanggung jawab publik 5. Mengevaluasi pendapat/ posisi, menggunakan kriteria standar untuk membuat keputusan tentang: • Kekuatan dan kelemahan issue / pendapat • Menciptakan pendapat baru 6. Mengambil pendapat/	ini antara lain: • Menggunakan berbagai sumber informasi seperti perpustakaan, surat kabar, TV, untuk mengetahui persoalan-persoalan publik • Upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok-kelompok kepentingan, pejabat pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya dengan cara menghadiri berbagai pertemuan publik seperti pertemuan organisasi siswa, komite sekolah, dewan sekolah, pertemuan desa/ BPD, pertemuan wali kota, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya 3. Mempengaruhi proses politik, pemerintahan, baik secara formal maupun informal. Yang termasuk keterampilan ini antara
---	---

posisi:	lain:
• Dari hasil seleksi berbagai posisi • Membuat pilihan baru	• Melakukan simulasi tentang kegiatan kampanye, pemilu, dengar pendapat di DPR/ DPRD, pertemuan wali kota, lobby, peradilan
7. Mempertahankan pendapat/ posisi:	
• Mengemukakan argumentasi berdasarkan asumsi atas posisi yang dipertahankan/ diambil/ dibela • Merespon posisi yang tidak disepakati	• Memberikan suara dalam suatu pemilihan • Membuat petisi • Melakukan pembicaraan/ memberi kesaksian dihadapan lembaga publik • Bergabung atau bekerja dalam lembaga advokasi untuk memperjuangkan tujuan bersama atau pihak lain • Meminta atau menyediakan diri untuk menduduki jabatan tertentu

Sumber: diolah dari *Center for civic education (1994), National standard for civics and government*, p.p. 1-5: 127-135

- c. Watak Kepribadian Kewarganegaraan (*Civic Disposition*). Watak Kepribadian Kewarganegaraan sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan essensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi dan tujuan mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan

pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif.

Berdasarkan temuan pembahasan di atas, maka kita dapat meyakini bahwa penelitian tindakan kelas merupakan formula yang tepat dalam mengatasi permasalahan belajar khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas mempunyai peranan penting dalam peningkatan mutu dan penyelesaian masalah pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Beberapa masalah pembelajaran PKn diantaranya rendahnya motivasi belajar, prestasi siswa, partisipasi di kelas, dan keaktifan belajar. Semua permasalahan ini dapat diselesaikan oleh guru dengan melaksanakan PTK. Secara umum melaksanakan pembelajaran PKn di sekolah harus terdiri dari tiga komponen yakni perencanaan yang matang, pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi. Ketiga komponen ini harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan agar menjadi kebiasaan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2021). Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Covid-19 Bagi Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. *Jurnal Basicedu: Research & Learning in Elementary Education*, 5(1), 367–375.
- Farida Hasan Rahmaibu, Farid Ahmadi, F. D. P. (2017). Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Adobe Flash Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn. *Jurnal Kreatif: Jurnal Kependidikan Dasar*, 7(1).
- Fidarto, M. (2019). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Pada Materi Berorganisasi di Kelas V SD Negeri 09 Kendari Barat. *Jurnal Ilmiah Pembelajaran Sekolah Dasar*, 1(1), 69–74.
- Hodriani. (2015). Pembinaan Sekolah SMK Untuk Meningkatkan

Profesionalisme Guru PKn Melalui PTK dan Publikasi Ilmiah. *PPKn Universitas Negeri Medan*.

- Lukiyah, L. (2017). Efektivitas Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran PKn (Penelitian Tindakan Kelas) pada Siswa Kelas VI SDN Randuagung 05. *Jurnal PTK Dan Pendidikan*, 3(1), 9–15. <https://doi.org/10.18592/ptk.v3i1.1058>
- Mardikayasa, I. M., Wiyasa, I. K. N., & Asri, I. G. A. A. S. (2015). Penerapan Mind Mapping Dalam Pendekatan Saintifik Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Dan Sikap Sosial Tema Cita-Citaku Pada Siswa Kelas Iva Sd Negeri 29 Pemecutan. *E-Journal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Noviana, E., & Huda, M. N. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Siswa Kelas Iv Sd Negeri 79 Pekanbaru. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(2), 204–210. <https://doi.org/10.33578/jpkip.v7i2.6287>
- Nurgiansah, T. H. (2019). Pemutakhiran Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan*, 1(1), 95–102.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Build An Attitude of Nationalism Students At SDN 7 Kadipaten With The Method of Discusion In The Subject PPKn. *Jurnal Serunai Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan STKIP Budi Daya Binjai*, 9(1), 1–11.
- Nurgiansah, T. H., Dewantara, J. A., & Rachman, F. (2020). The Implementation of Character Education in the Civics Education Syllabus at SMA Negeri 1 Sleman. *Jurnal Etika Demokrasi*, 5(2), 110–121.
- Nurgiansah, T. H., & Pringgowijoyo, Y. (2020). Pelatihan Penggunaan Model Pembelajaran Jurisprudensial Pada Guru Di KB TK Surya Marta Yogyakarta. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan. PKNSTAN*, 2(1).
- Nurgiansah, T. H., & Sukmawati. (2020). Tantangan Guru Pendidikan Kewarganegaraan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 17(2), 139–149.
- Nurgiansah, T. H., & Widyastuti, T. M. (2020). Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa PPKn UPY Dalam Berlalu Lintas. *Civic Edu: Jurnal*

- Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pasundan*, 2(2), 97–102.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rokanah. (2015). Meningkatkan Prestasi Belajar PKn Melalui Metode Pemberian Tugas Daur Ulang. *Jurnal Media Didaktika*, 1(1), 31–37.
- Sari, H. N. M. (2014). Implementasi Metode Vak (Visual Auditori Kinestetik) Guna Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Pkn Materi Penegakan Ham (Kelas X Bina Prestasi 2 Di Man 2 Ponorogo Tahun 2013 / 2014). *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Subagyo. (2018). Peningkatan Hasil Belajar PKn melalui Model Kooperatif tipe Two Stay Two Stray. *Jurnal Pendidikan: Riset & Konseptual*, 2(1), 103–107.
- Surbakti, K. (2018). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Siswa Dengan Menggunakan Model Talking Stick materi sistem pemerintahan pusat. *Jurnal Tematik*, 7(1), 166–171.
file:///C:/Users/7/Downloads/10386-22291-1-SM.pdf
- Susanti, E., Dicki, D., Dosen, H., Tarbiyah, F., Uin, K., Syarif, S., & Riau, K. (2015). Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Penerapan Penelitian Tindakan Kelas (Ptk) Dalam Pendidikan Islam. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 14(1), 151–174.
- Suwastana, I. W. (2016). Penerapan pembelajaran melalui model kooperatif numbered heads together siswa kelas V SDN No 1 Tonggolobibi untuk meningkatkan prestasi belajar PKn. *Jurnal Kreatif Tadulako Online*, 4(1), 119–135.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JKTO/article/viewFile/3281/2324>
- Syaparuddin, S., Elihami, E., & Enrekang, M. (2020). Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui Video Pada Pembelajaran PKn di Sekolah Paket C. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 187–200.
file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/318-Article Text-621-1-10-20200124-2.pdf
- Taufiqillah, T. (2006). Penggunaan Media Gambar Dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pkn Kelas Iv Sd Hang Tuah 11 Sidoarjo. *PGSD FIP Universitas Negeri Surabaya*, 1–5.
- Yulianingrum, K. (2014). Kompetensi Profesionalisme Guru Pendidikan

Kewarganegaraan Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan (Studi Kasus Guru PKn di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta). *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

MODEL PEMBELAJARAN PPKN MELALUI PENDEKATAN KOMPREHENSIF

Intan Kusumawati^{1*}, Joko Wahono¹, Ahmad Nasir Ari Bowo¹

¹ Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia

*intankusumawati1978@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan moral maupun karakter yang dialami khususnya siswa atau generasi muda. Berbagai permasalahan tersebut meliputi kurangnya kedisiplinan, tanggung jawab, nasionalisme peserta didik. Bahkan tidak sedikit juga siswa yang melakukan tindakan kejahatan misalnya tawuran, tindakan kekerasan, penyalahgunaan narkoba dan berbagai permasalahan-permasalahan lainnya. Tentu saja ini menjadi perhatian orang tua dan guru dalam mendidik dan mengantarkan peserta didik agar memiliki karakter yang baik. Tujuan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah mencetak generasi bangsa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Maka dari itu, tugas seorang guru khususnya guru PPKn diantaranya mampu mengembangkan model pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang sesuai dengan karakter siswa agar mempunyai karakter yang baik. Tujuan penelitian ini adalah menemukan sebuah model pembelajaran PPKn yang dapat mengembangkan karakter siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam pengambilan datanya melalui wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran PPKn berbasis dengan pendekatan komprehensif dapat mengembangkan dan membentuk karakter seorang peserta didik menjadi seorang yang berkarakter meliputi penanaman nilai/ inkulkasi (*inculcation*), keteladan (*modeling*), fasilitasi nilai (*facilitation*), dan pengembangan keterampilan siswa (*skill building*).

Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Pendidikan Kewarganegaraan

ABSTRACT

Education aims to educate and create the nation's future generation with character. However, problems like brawls, violence, abuse of narcotics and illegal drugs and promiscuity still occurs among the students. This becomes the concern of parents and teachers in educating and leading students to develop their character. The teacher is obligated to develop Pancasila and Citizenship Education learning model suitable to students in order to have good character. The purpose of this study was to find out Pancasila and Citizenship Education learning model to develop students' character. This study used quantitative and qualitative approaches in collecting data through interviews and questionnaires. The results showed that Pancasila and Citizenship Education Learning model based on character education through comprehensive approach could develop and shape the students' character such as inculcation, modeling, values facilitation, and skill building.

Keywords: *Model, Learning, Pancasila and Citizenship Education, Approach, Comprehensive*

PENDAHULUAN

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang telah dilaksanakan di sekolah yang selama ini pada prinsipnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mencetak generasi yang cerdas, mandiri, dan berkarakter Pancasila. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Keberhasilan tujuan pendidikan tersebut sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dari pembelajaran di kelas.

Keberhasilan pembelajaran di kelas akan dipengaruhi dengan model pembelajaran yang dipakai dan sebagai acuan guru menyampaikan rencana pembelajaran di kelas sesuai tujuan pendidikan. Sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, untuk menjadikan bangsa yang berkarakter Pancasila, sehingga Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah menengah atas (Sisdiknas, 2003). PPKn yang berhasil dapat terwujud dalam perilaku keseharian peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa (Sisdiknas, 2003). Peran pendidikan berupaya

mencetak generasi penerus bangsa melalui mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, kemandirian, daya kreativitas serta kemampuan memecahkan permasalahan (Zuchdi, 2019).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan membentuk siswa menjadi pribadi yang tanggung, bertanggungjawab dan berkarakter yang mampu mematuhi aturan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik (Dewantara et al., 2020). Melalui pendidikan akan mengantar seseorang menjadi warga Negara yang memiliki karakter yang nantinya akan mengantarkan Negara tersebut pada tujuan negaranya (Kusumawati, 2016). Pendidikan bahkan dilaksanakan sedini mungkin agar terjadi proses pembentukan karakter (Kusumawati, 2017). Wawasan serta kesadaran mengenai menjadi warganegara yang baik perlu ditumbuhkembangkan melalui sebuah proses yaitu melalui pendidikan. Misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bahwa untuk menumbuhkan wawasan serta pengetahuan dalam hal nilai-nilai budaya Indonesia yang luhur serta berwawasan nusantara (Sumarsono, 2005). Dalam pembelajaran PPKn memfasilitasi siswa untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan serta wawasan kebangsaan. Pelajaran PPKn akan membentuk karakter siswa secara menyeluruh dari segi agama, sosial, kultural, bahasa, usia supaya menjadi warganegara yang berkarakter.

Realitas pembelajaran selama ini dapat diketahui bahwa pembelajaran PPKn ternyata belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan. Beberapa permasalahan kurang berhasilnya tujuan pembelajaran PPKn antara lain beberapa guru belum memanfaatkan maupun mengembangkan media yang sesuai dengan materi pembelajaran (Sumarsono, 2005), penggunaan strategi maupun pendekatan pembelajaran juga belum maksimal (Sumarsono, 2005), serta model pembelajaran yang digunakan. Kurangnya kemampuan guru dalam pembelajaran PPKn tersebut sehingga berdampak pada karakter peserta didik meliputi kurangnya kedisiplinan, tanggung jawab, bahkan sampai tindakan kriminal (Nuryati dkk, 2017). Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut diantaranya model pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sesuai dengan keadaan masing-masing siswa (Sumarsono, 2005). Diperlukan pendekatan yang menyeluruh atau komprehensif. Pendekatan ini mulai dari orientasi, eksplorasi, pendalaman dan penyimpulan (Nucci & Narváez, 2014), sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan sebagaimana dipaparkan pada uraian di atas maka diperlukan model pembelajaran PPKn melalui pendekatan yang menyeluruh atau komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah menemukan model pembelajaran PPKn dengan pendekatan komprehensif. Pendekatan komprehensif meliputi penanaman nilai/inkulkasi (*inculcation*), keteladan (*modeling*), fasilitasi nilai (*facilitation*), dan pengembangan keterampilan siswa (*skill building*) (Zuchdi, 2019). Pendekatan komprehensif dalam pendidikan karakter meliputi inkulkasi, pemodelan, fasilitasi nilai dan pengembangan soft skill (Lickona, 1991).

Fokus penelitian ini adalah untuk menemukan model pembelajaran PPKn yang sesuai dengan karakteristik siswa yang disesuaikan dengan tema pembelajaran dengan pendekatan komprehensif. Tujuan Penelitian ini adalah menemukan suatu model pembelajaran PPKn sesuai dengan tujuan pembelajaran PPKn yaitu mengembangkan potensi siswa, baik pengetahuan serta keterampilan yang mengantarkan menjadi warganegara yang baik dan berkarakter. Pembelajaran PPKn memiliki tujuan nilai-nilai moral yang diharapkan mengandung nilai-nilai moral yang dapat diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang disebut dengan karakter (Apriono, 2009). Pembelajaran PPKn yang terkandung nilai-nilai moral yang diharapkan dapat memberikan pembelajaran mengenai bagaimana pelajar bertingkah laku dalam kehidupan dalam keseharian dan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelajar diharapkan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dipakai dalam bersosialisasi dalam kehidupan sosialnya. Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 kurikulum dan perangkat pembelajaran digunakan sebagai pedoman pembelajaran di kelas. Pembelajaran PPKn sesuai dengan kurikulum 2013 diharapkan menyajikan pembelajaran secara kontekstual dan mengkaitkan dengan kondisi yang ada di lapangan (Sisdiknas, 2003). Diperlukan teori dan praktek dalam pengemasan pembelajaran di kelas. Guru PPKn yang kreatif, inovatif dan terbuka serta bisa mengidentifikasi masalah dan jalan agar pelajar bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada.

Pembelajaran PPKn Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik dalam setiap pembelajarannya (Samsuri, 2011). Dalam pembelajaran PPKn seorang guru dituntut menggunakan metode dan model pengajaran yang tepat agar tujuan pendidikan tercapai. Pembelajaran PPKn diharapkan dapat membentuk warga negara Indonesia yang sesuai dengan karakter dalam dasar negara, yaitu

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (Ihsan, 2017). Mata pelajaran PPKn dapat mengembangkan moral dan nilai meningkatkan mutu dan kepribadian Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Syam, 2011). Pendekatan yang dilakukan mulai dari pendahuluan, kegiatan inti dengan mencari dan menemukan, mendalami dan menyimpulkan akhir pembelajaran. Dengan pendekatan komprehensif diharapkan peserta didik atau pelajar dapat memiliki karakter yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran PPKn. Pertanyaan yang ingin dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana model pembelajaran PPKn yang sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran, serta untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa menjadi warganegara yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif yang disebut *mixed methods research*. Penelitian dengan menggunakan *mixed methods research* (Cohen et al., 2018: 31) dengan pengumpulan data, analisis dan pencampuran baik data kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran PPKn di sekolah dengan menggunakan pendekatan komprehensif dalam pembelajarannya. Tahapan *mixed methods research* (Cohen et al., 2018: 48) mulai dari menemukan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, analisis data, dan terakhir membuat laporan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data secara kualitatif dan juga kuantitatif. Penelitian dengan wawancara serta menggunakan kuisioner dalam pengambilan data melalui instrument penelitian. Subjek penelitian ada 5 sekolah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu SMA N 2 Sleman, SMA N 1 Sentolo Kulon Progo, SMA Negeri Patuk Gunung Kidul, SMA N 1 Banguntapan Bantul dan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pembelajaran PPKn melalui pendekatan komprehensif ini dilakukan peneliti di kelima sekolah yang lokasinya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kota pelajar serta mengedepankan pendidikan melalui visinya yaitu Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja dengan memiliki misi Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia",

yakni : (1) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing, (2) Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, (3) Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan, (4) Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan (5) Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Implementasi pendidikan karakter di sekolah tidak merupakan mata pelajaran tersendiri, tidak pula merupakan tambahan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD), tetapi dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, pengembangan diri, dan budaya sekolah, serta muatan lokal (Judiani, 2010).

Manusia atau seseorang yang mempunyai kepribadian dan karakter apalagi seorang yang terdidik semestinya menjadi orang yang bijak dalam segala aktivitas dalam kehidupannya (Megawangi, 2010). Karakter seseorang akan terus berkembang ketika seseorang itu mau belajar mau berproses dan terus menerus berusaha ke arah pengembangan diri yang baik dan bisa suatu saat kelak menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter Pancasila. Namun dalam pembelajaran di sekolah masih terdapat penilaian sikap siswa yang belum terdokumentasi, kurangnya pemahaman guru untuk mengimplementasikan pendidikan karakter, dan tidak adanya sinergi antara pendidikan di sekolah dengan pendidikan di rumah (Darmayanti & Wibowo, 2014). Zaman telah berubah dengan pesatnya dan mengakibatkan arus globalisasi memberikan dampak positif dan negatif bagi setiap warga negara Indonesia (Kurniawan, 2015). Diperlukan penanganan segala bentuk dampak negatif mengenai arus globalisasi dengan membetengi dengan pendidikan karakter (Dalyono & Lestariningsih, 2016).

Setiap orang seharusnya bertanggungjawab atas karakternya. Pendidikan karakter tidak hanya cukup disampaikan di sekolah saja

namun semestinya diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari (Gunawan, 2012). Baik buruknya karakter seseorang tidaklah hanya dilihat secara pintas saja namun secara menyeluruh. Pendidikan karakter perlu ada penanganan serius dalam berbagai pihak, mulai dari dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter pada prinsipnya adalah merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab dengan hati yang komitmen, jujur, mandiri, ikhlas dan niat dalam hati oleh berbagai personil sekolah baik dari kepala sekolah, guru, karyawan dan murid, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dalam kehidupan rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak dan anggota masyarakat untuk membantu anak-anak dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli (Hendriana & Jacobus, 2017).

Anak berkarakter sehat bukan berarti tak pernah melakukan hal-hal yang negatif, melainkan perilaku itu masih dalam batas wajar (Suwito, 2012). Seorang anak terkadang masih melakukan imitasi atau peniruan dengan orang-orang yang ada disekitarnya. Perilaku anak yang terkadang melakukan kenakalan yang masih wajar masih bisa diperbaiki perilakunya. Dengan teguran atau nasehat yang bijak dan motivasi dari lingkungannya untuk berperilaku baik, sopan dan berkarakter. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya, dan menjadi individu yang baik dan perlu adanya kesadaran diri yang dilakukan secara sadar (Ramdhani, 2017). Karakter seseorang bisa dikondisikan secara social (Riesman et al., 2020). Secara sosial karena memang kehidupan sosial masyarakatlah yang membentuk karakter seseorang tersebut. Orang yang satu bisa mempengaruhi orang yang lainnya. Sebuah alternatif dari pendidikan karakter adalah etika kepedulian. Etika kepedulian dapat dilihat sebagai pada dasarnya relasional, bukan berbasis individu-agen di jalan etika kebajikan, dan etika kepedulian lebih tidak langsung daripada pendidikan karakter (Noddings, 2002).

Dalam beberapa tahun terakhir "pendidikan karakter" telah muncul di Amerika Serikat sebagai istilah utama untuk upaya sekolah untuk melaksanakan program dalam pendidikan nilai-nilai moral, etika dan kewarganegaraan dan menetapkan 11 prinsip untuk memandu sekolah dalam merencanakan pendidikan karakter mereka. Ini termasuk: isu-isu seperti nilai-nilai etika inti dan pembedaannya, definisi karakter, pendekatan yang komprehensif dan disengaja untuk mengembangkan

karakter yang baik, mengembangkan sekolah sebagai komunitas yang peduli, hubungan antara pendidikan karakter dan kurikulum akademik serta evaluasi (Lickona, 1996). Padahal pendidikan karakter bukanlah hal baru, namun kajian ilmiah tentang keefektifannya baru dilakukan diterapkan secara sporadis selama tiga puluh lima tahun terakhir. Sebagian besar penerapan oleh karena itu, pendidikan karakter tidak diinformasikan oleh basis pengetahuan ilmiah (Berkowitz & Bier, 2004).

Pembentukan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib belakangan ini telah dilakukan dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk 'menggenjot' pendidikan berkarakter. Identifikasi memiliki peran penting untuk dimainkan dalam membantu membentuk dan memperkuat karakter dasar (Berkowitz & Bier, 2004). Pengembangan model pembelajaran ini melalui tiga tahapan yaitu studi pendahuluan yaitu peneliti dan pihak sekolah mendiskusikan rancangan penelitian serta pengalihan data yaitu terkait pelaksanaan pembelajaran PPKn yang selama ini telah dilakukan, kemudian peneliti bersama guru merancang model pembelajaran PPKn menggunakan cara mengembangkan model berbasis pendidikan karakter dengan menggunakan pendekatan komprehensif. dan setelah itu pengujian model. Dalam penelitian ini didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Dalam penelitian ini sekolah menggunakan Kurikulum 2013 dalam pelaksanaan pembelajarannya. Kurikulum yang digunakan dengan menggunakan Guide curriculum (kurikulum terbimbing), artinya kurikulum setengah terbuka, setengah tertutup. Rambu-rambu pengajar telah ditentukan dalam kurikulum, tetapi guru masih diberi kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam kelas. Dalam Pengembangan Kurikulum 2013 di penelitian ini 60% menekankan pada Keseimbangan pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Sedangkan 40% menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran.

Dalam pelaksanaan kurikulum yang dipakai selama ini menggunakan proses pembelajaran aktif, guru melakukan tugasnya sebagai fasilitator maupun motivator dengan mengemas mata pelajaran menjadi lebih maknawi dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran tematik integratif dan pendekatan saintifik. Kelemahan yang terdapat pada kurikulum 2013 adalah cocok diterapkan di sekolah yang sudah maju dan gurunya semangat belajar tinggi, masyarakat yang sudah terdidik, muridnya memiliki kemampuan dan fasilitas setara serta infrastruktur telekomunikasi dan transportasi sudah merata sehingga

tidak menghambat proses serta pada penggunaan Ujian Nasional (UN) sebagai evaluasi standar proses pembelajaran siswa aktif.

Model pembelajaran PPKn dalam mengembangkan karakter siswa di kelas dengan menggunakan metode daring dengan menggunakan : (1) Model Pembelajaran Kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inkuiri (Purnamasari, 2014); (2) Metode Problem Solving. Model Pembelajaran problem solving adalah salah satu pendekatan yang dalam sebuah pembelajaran kelompok dan membutuhkan kemampuan yang sederhana serta bisa dilakukan oleh semua peserta didik dalam mengemukakan pertanyaan tersebut sesuai dengan materi yang dipelajarinya (Putra, 2018); (3) Metode Pemecahan Masalah. Metode pemecahan masalah atau Problem Solving sendiri adalah penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa. Di sisi lain, pemecahan masalah juga diartikan sebagai model pembelajaran yang mengajarkan penyelesaian masalah dengan memberikan penekanan pada terselesaikannya suatu masalah secara nalar (Anwar, 2017); (4) Metode Pembiasaan dan Keteladanan. Keteladanan dan pembiasaan dalam pendidikan amat dibutuhkan karena secara psikologis, peserta didik lebih banyak mencontoh perilaku atau sosok figur yang diidolakannya termasuk gurunya. Pembiasaan juga tidak kalah pentingnya dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena setiap pengetahuan atau tingkah laku yang diperoleh dengan pembiasaan sangat sulit mengubah atau menghilangkannya sehingga cara ini amat berguna dalam mendidik (Manan, 2017).

Strategi yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran PPKn adalah menggunakan strategi pembelajaran. Strategi Pembelajaran Langsung (instruksi langsung) seperti metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, latihan dan latihan, dan demonstrasi. Serta Strategi Pembelajaran Langsung (instruksi langsung) seperti metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, latihan dan latihan, dan demonstrasi. Metode pengajaran dalam pembelajaran PPKn yang digunakan guru dalam mengembangkan karakter siswa di kelas dengan pembelajaran interaktif 80% dan pembelajaran langsung sebanyak 20%, Dalam memberikan tugas belajar kepada siswa dalam pembentukan karakter, guru memberikan tugas berupa belajar mandiri 40%, Belajar

Kelompok 40% dan Belajar melalui pengalaman 20%. Guru dalam memberikan tugas mandiri kepada siswa dalam bentuk karakter bisa dilihat dalam gambar 12 berupa 80% memberikan pekerjaan rumah dan 20 % melalui pemberian tugas berupa karya tulis. Guru dalam memberikan tugas belajar siswa melalui pengalaman berupa 60% dengan bermain peran sedangkan 40% menggunakan observasi atau *survey field trips* sejumlah 40%.

Dalam memberikan pembelajaran tidak langsung kepada siswa yang berkaitan dengan pengembangan karakter berupa 80% menggunakan metode pemecahan masalah serta hanya 20% menggunakan metode studi kasus. Dalam pembelajaran langsung kepada siswa yang berkaitannya dengan pengembangan karakter yaitu dengan menggunakan demonstrasi 40 %, Pengajaran eksplisit 40% serta ceramah 20%. Dalam pembelajaran pada pengembangan karakter siswa berupa diskusi sebanyak 40%, Bermain peran sebanyak 40%, dan Cooperative learning sebanyak 20 %, Dalam pengembangan pendidikan karakter mengedepankan nilai-nilai pengetahuan, ketrampilan sosial dan religiusitas, Komponen karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran PPKn di sekolah memuat yaitu komponen moral knowing, moral feeling dan moral action (Dewantara et al., 2020; Triwijaya et al., 2020). Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada 5 sekolah yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan model pembelajaran PPKn selama ini sudah menggunakan pendekatan komprehensif yaitu inkulkasi (*inculcatioan*), keteladanan (*modeling*), fasilitasi (*facilitation*), dan pengembangan keterampilan siswa (*skill building*).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada 5 sekolah yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan model pembelajaran PPKn selama ini sudah menggunakan pendekatan komprehensif yaitu inkulkasi, pemodelan, fasilitasi nilai dan pengembangan soft skill.

Terimakasih diucapkan kepada Kepala sekolah yang telah memberikan ijin penelitian serta guru dan karyawan SMA N 2 Sleman, SMA N 1 Sentolo Kulon Progo, SMA Negeri Patuk Gunung Kidul, SMA N 1 Banguntapan Bantul dan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang telah bekerjasama dalam kelancaran penelitian ini. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan dan

pengembangan keterampilan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) atas dukungan dana untuk penelitian dan publikasi artikel ini dengan nomor Hibah 081 / SP2HMAD / LT / DRPM / 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, N. N. (2017). Meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran pkn dengan penggunaan metode pemecahan masalah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(3), 99–112.
- Apriono, D. (2009). Advance Organizer: Konsep, Komponen Model, dan Implementasi dalam Pembelajaran PPKn. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2004). based character education. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 591(1), 72–85.
- Cohen, L., Lawrence, M., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education. Eighth Edition. In *Research Methods in Education*.
- Dalyono, B., & Lestariningsih, E. D. (2016). Implementasi penguatan pendidikan karakter di sekolah. *Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial Dan Humaniora*, 3(2, Oktober), 33–42.
- Darmayanti, S. E., & Wibowo, U. B. (2014). Evaluasi program pendidikan karakter di sekolah dasar Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Prima Edukasia*, 2(2), 223–234.
- Dewantara, J. A., Efriani, E., & Sulistyarini, S. (2020). Caring National Identity Through Teacher Contributions in the Border: Pancasila Actionistic Basic Implementation. *Jurnal Basicedu*, 4(3), 649–661. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i3.407>
- Gunawan, H. (2012). Pendidikan karakter. *Bandung: Alfabeta*, 2.
- Hendriana, E. C., & Jacobus, A. (2017). Implementasi pendidikan karakter di sekolah melalui keteladanan dan pembiasaan. *JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia)*, 1(2), 25–29.
- Ihsan, I. (2017). Kecenderungan Global dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah. *JPK (Jurnal*

- Pancasila Dan Kewarganegaraan*), 2(2), 49–58.
- Judiani, S. (2010). Implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar melalui penguatan pelaksanaan kurikulum. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(9), 280–289.
- Kurniawan, M. I. (2015). Tri pusat pendidikan sebagai sarana pendidikan karakter anak sekolah dasar. *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 41–49.
- Kusumawati, I. (2016). Landasan Filosofis Pengembangan Karakter Dalam Pembentukan Karakter. *Academy of Education Journal*, 7(1), 1–15.
<https://doi.org/10.47200/aoej.v7i1.342>
- Kusumawati, I. (2017). Pengembangan Karakter Siswa Raudlatul Athfal Berbasis Pendidikan Agama Islam. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(02), 139–148.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character* (New York, Bantam). McCI ET NAN, BE (1992) *Schools and the Shaping of Character: Moral Education in America*, 525–543.
- Lickona, T. (1996). Eleven principles of effective character education. *Journal of Moral Education*, 25(1), 93–100.
- Manan, S. (2017). Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2(1), 49–65.
- Megawangi, R. (2010). Pengembangan program pendidikan karakter di sekolah: pengalaman sekolah karakter. *Jakarta: Indonesia Heritage Foundation (IHF)*.
- Noddings, N. (2002). *Educating moral people: A caring alternative to character education*. ERIC.
- Nucci, L., & Narváez, D. (2014). *Handbook of moral and character education*. Routledge.
- Purnamasari, Y. (2014). Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament (TGT) terhadap kemandirian belajar dan peningkatan kemampuan penalaran dan koneksi matematik peserta didik SMPN 1 kota Tasikmalaya. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 1(1), 209664.
- Putra, N. L. J. (2018). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar PKn pada Materi Sikap Positif terhadap Norma melalui Model Pembelajaran Problem Solving. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*,

9(2), 49–64.

Ramdhani, M. A. (2017). Lingkungan pendidikan dalam implementasi pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), 28–37.

Riesman, D., Glazer, N., & Denney, R. (2020). *The lonely crowd: A study of the changing American character*. Veritas Paperbacks.

Samsuri, S. (2011). Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, 2, 78213.

Sisdiknas, U.-U. (2003). Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003. *Jakarta: Sinar Grafika*.

Sumarsono, S. (2005). Dkk. In *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suwito, A. (2012). Integrasi Nilai Pendidikan Karakter ke dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Melalui RPP. *CIVIS*, 2(2/Juli).

Syam, N. (2011). Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pkn di Sekolah Dasar melalui Model Pengajaran Bermain Peran. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 24(XV).

Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 115.
<https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41083>

Zuchdi, D. (2019). *Humanisasi pendidikan*. Bumi Aksara.

PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI DESA PERAPAKAN KABUPATEN SAMBAS

Hemafitria^{1*}, Fety Novianty¹, Fitriani¹

¹ Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Pontianak, Indonesia

* rizkyema10@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan. Partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela masyarakat dalam memilih pemimpin baik secara langsung atau tidak langsung dan ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk deskriptif, subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Teknik dalam pengumpulan data ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wujud partisipasi politik masyarakat dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik kepuasan dan ketidakpuasan warga negara yang merujuk kepada tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah masyarakat secara aktif menggunakan hak suaranya dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan ikut serta dalam kegiatan politik. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah ialah faktor kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menyangkut tentang pengetahuan masyarakat tentang politik. Upaya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah dalam melakukan kegiatan sosialisasi, pemerintah desa sudah sangat maksimal dalam menyebarkan pelaksanaan kegiatan pemilu kepada masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, dan Pilkada

ABSTRACT

Community political participation is closely related to a country's democracy. In a democratic country, supreme sovereignty rests with the people, whose exercise is carried out through joint activities to determine goals, as well as the future and to determine who will take the lead. Political participation is the voluntary activity of the community in electing leaders either directly or indirectly and actively participating in political life. The method used in this research is qualitative with descriptive form, the subjects in this study are the village head, community leaders, and youth leaders. The techniques in collecting this data are observation, interviews, documentation. The results of this study can be concluded that the form of public political participation can be used as a measure to assess the stability of the political system, citizen satisfaction and dissatisfaction, which refers to the high and low level of public political participation in the general election of regional heads, the community actively uses their voting rights in carrying out general elections. regions and participate in political activities. Factors that influence public political participation in regional head elections are the factor of public awareness and trust in the government concerning public knowledge about politics. Efforts to participate in public politics in the general elections for regional heads in conducting socialization activities, the village government has been very maximal in disseminating the implementation of election activities to the community.

Keywords: Political Participation, General election , District Heads Election

PENDAHULUAN

Demokrasi yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan tersebut (Rosana, 2016). Jadi, negara yang berdemokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Negara yang berdemokrasi memiliki keunggulan tersendiri, yang mana masyarakat sebagai tokoh utama dan memiliki peranan penting dalam berdemokrasi. Salah satu peranan yang dimaksud dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Berbicara tentang partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seseorang ataupun sekelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan. Maka suatu kegiatan yang dimaksud adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang dalam memberikan hak suara pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dan ikut serta menjadi anggota partai.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar dari sebuah demokrasi. Salah satu konsep modern yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai

kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebuah demokrasi (Sarbani, 2015). Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan (Triwijaya et al., 2020). Secara umum pilkada secara langsung memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat didalam berbagai proses politik, karena pada prinsipnya dinilai sebagai bentuk pengembalian atas hak masyarakat di daerah secara utuh dengan memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan dan menentukan pilihan pimpinan sebagai kepala daerah Pemilihan umum diikuti oleh Partai-partai politik yang mewakili kepentingan spesifik warganegara, kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawa partai politik tatkala mereka berkampanye. Oleh karena itu sistem pelaksanaan pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat, agar mewakili di dalam sebuah proses pembuatan kebijakan negara di parlemen. (Miriam, 2015).

Sistem pemilihan umum kepala daerah langsung merupakan elemen penting yang sangat menentukan kualitas kehidupan demokrasi ditingkat lokal. Mengingat esensi utama yang terkandung didalam sistem pemilihan kepala daerah langsung tidak hanya sebatas pada legimitasi untuk menentukan pemilihan kepala daerah melalui pemberian suara dalam momen-momen elektoral, melainkan dengan mengintervensi proses pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka agar membuka kesadaran tentang demokrasi yang sejatinya menempatkan rakyat sebagai partisipasi, bukan hanya menjadi penonton atas permainan politik. Partisipasi politik ialah aspek penting dalam tatanan suatu negara demokrasi, sekaligus sebagai sebuah ciri khas adanya suatu modernisasi politik (Dewantara et al., 2019). Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politik itu lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi suatu kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Partisipasi politik ialah wujud dari kedaulatan rakyat yaitu suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Partisipasi politik memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi, apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik demokratis di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini.

Kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik merupakan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Karena dari adanya kesadaran masyarakat akan menimbulkan aktivitas partisipasi aktif dalam mengikuti setiap kegiatan politik yang pada dasarnya merupakan proses transformasi kepentingan publik dalam ranah struktur politik. Terutama sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, dimana pada saat pemilihan kepala daerah, kedudukan dan peran rakyat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik di wilayahnya dengan memberikan suara secara langsung.

Bila merujuk pada uraian tersebut, bahwa kesadaran akan partisipasi politik masyarakat apapun alasannya merupakan suatu prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam membangun negara bangsa yang demokratis. Artinya partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan suatu negara. Terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, ukuran partisipasi politik merupakan faktor yang menentukan tinggi dan rendahnya kadar demokrasi yang berkembang di negara tersebut. Jika pelaksanaan pemilu terjadi penyimpangan dan berbagai kecurangan dilakukan oleh golongan tertentu untuk mendapatkan jumlah suara terbanyak maka pemilu yang dilakukan secara serentak di belahan dunia dengan biaya yang tak sedikit ini tidak akan mencapai hasil optimal sesuai dengan harapan rakyat Indonesia secara mayoritas. Mengakibatkan, pemerintahan demokratis hanya sebagai angan yang tak terwujud bahkan kekacauan terjadi dimana-mana.

Untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, serta dapat dipertanggung jawabkan, maka sangat ditentukan oleh seberapa besar keterlibatan masyarakat ikut serta menentukan, mengawasi dan memantau jalannya proses kontestasi demokrasi itu sendiri. Dan masyarakat lebih dapat ikut berpartisipasi didalam pemilihan kepala daerah, dan membangun kesadaran dalam berpolitik,serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala

daerah yang ingin membangun daerahnya untuk lebih maju dan sejahtera. Masyarakat dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung didalam undang-undang sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. Implikasi lebih lanjut melalui pemahaman undang- undang tersebut akan membuat masyarakat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik (Muhaling, 2014).

Tingkat partisipasi masyarakat terutama dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung menjadi permasalahan tersendiri. Meskipun Pemilihan Kepala Daerah secara langsung berjalan relatif lancar dan aman, sebagai bentuk dari perkembangan kehidupan demokrasi yang kian modern, sementara disisi lain tidak diikuti dengan meningkatnya tingkat partisipasi dalam kehidupan politik sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk menentukan masa depan bangsa lima tahun kedepan. Dapat kita lihat bahwa dalam partisipasi politik masyarakat yang masih Rendahnya Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah di desa perapakan pada pemilihan umum dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap politik membuat masyarakat tidak peduli dan cenderung apatis dengan politik dan menganggap bahwa politik hanya sebatas proses memilih pemimpin dan pemilu itu tidaklah penting. Maka dibutuhkan suatu tindakan dengan berbagai cara dan strategis yang tepat agar lebih baik kedepannya. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi politik dengan cara menumbuhkan kesadaran politik melalui sosialisasi politik. Menurut Michael Rush dan Philip Althoff dalam (Sumantri, 2018) Sosialisasi politik merupakan suatu proses ataupun cara memberitahukan suatu sistem politik kepada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menanggapi serta bersikap perihal dalam peristiwa politik.” Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik ialah suatu proses untuk memperkenalkan dan memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan menentukan sikapnya terhadap gejala-gejala politik yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di desa perapakan kecamatan pemangkat kabupaten sambas, Penelitian yang dilakukan ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah di desa perapakan kecamatan pemangkat kabupaten sambas. Penetapan partisipan penelitian dalam penelitian ini dari kalangan tokoh dan warga masyarakat. Melalui tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemerintah, petugas Pemilu diperoleh diskripsi secara komprehensif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2014). Sedangkan metode deskriptif menurut (Hadari, 2012) dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subyek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Teknik observasi langsung dan komunikasi langsung berupa wawancara, tidak langsung dan Teknik dokumentasi dalam proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di desa perapakan kecamatan pemangkat kabupaten sambas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara dalam kehidupan dalam mewujudkan berbagai kebutuhan dan kepentingannya, walaupun sering terjadi benturan dengan kepentingan dan kebijaksanaan dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah untuk menentukan hak suara dalam memilih pemimpin yang bijaksana, tegas, lugas dan bertanggung jawab, jujur serta dapat mengemban dan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Menurut Ramlan Surbakti dalam (Cholisin & Nasiwan, 2012) menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela masyarakat dalam memilih pemimpin baik langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan umum. Sedangkan Menurut (Liando & M, 2014) menyatakan bahwa Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu memang menjadi indikator legitimasi pemerintahan yang terbentuk, tidak jarang

pemerintah berusaha mendorong masyarakatnya untuk memberikan suaranya ketika Pemilu berlangsung (Sucipto, 2014).

Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa jika kesadaran politik berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat, karena apabila seseorang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara maka akan mendorong orang tersebut untuk berpartisipasi politik. Dapat disimpulkan bahwa usaha pemerintah desa dalam menjalankan dan mengajak masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum bertujuan untuk mengajak masyarakat ikut serta dan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan dan harapan untuk kedepan agar menjadi lebih baik.

Wujud Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan

Secara umum wujud partisipasi politik masyarakat yang dilakukan dalam kegiatan pemilihan umum di desa Perapakan kecamatan pemangkat berlangsung sangat baik. Kondisi ini diwujudkan melalui partisipasi politik masyarakat yang ikut dalam memberikan suara, melakukan kegiatan kampanye, ikut dalam diskusi politik dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Dalam suatu negara demokrasi dimana masyarakat dilibatkan langsung untuk ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari beberapa sumber yang menyatakan secara umum bahwa wujud partisipasi politik masyarakat di desa Perapakan kecamatan pemangkat kabupaten sambas terwujud dari antusias masyarakat pergi ke TPS untuk memberikan suara dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan masyarakat juga ikut andil dalam kegiatan politik seperti diskusi politik atau bertukar pikiran membicarakan tentang kegiatan pemilihan umum yang berlangsung didesa perapakan. masyarakat juga ikut serta dalam kegiatan kampanye meski ditengah covid 19 walaupun hanya Sebagian saja yang ikut serta. Selanjutnya

masyarakat juga membentuk dan bergabung dalam sebuah kelompok atau menjadi tim sukses dan masyarakat menyatu dan berkoalisi membuat tim sukses untuk mendukung pasangan calon pemimpin daerah yang akan mereka dukung dan mencari suara terbanyak supaya calon yang akan mereka beri dukungan menang dalam pemilihan umum kepala daerah. Hal ini didukung dari hasil perhitungan surat suara pemilihan umum kepala daerah dari TPS 001 sampai TPS 011 di Desa Perapakan Kabupaten Sambas.

Berdasarkan data hasil perhitungan surat suara pemilihan kepala daerah di Desa Perapakan Kabupaten Sambas dapat dilihat bahwa 71,33% penduduk di Desa Perapakan Kabupaten Sambas ikut terlibat dalam pemilihan kepala daerah dengan masyarakat Desa Perapakan Kabupaten sambas yang tergolong dalam DPT sebanyak 3286 atau sebesar 72,69% dari 4520 masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Desa Perapakan Kabupaten Sambas yang tidak memilih (golput) dalam pemilihan kepala daerah sebanyak 942 masyarakat desa.

Berdasarkan temuan diatas dapat dilihat bahwa wujud partisipasi politik masyarakat secara aktif dalam melakukan kegiatan politik pada saat pemilihan umum kepala daerah dimana masyarakat memilih langsung pada saat proses pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih calon pemimpin kepala daerah. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang secara aktif dalam kegiatan politik atau kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. (Arifin, 2015). Selain itu menurut (Liando & M, 2014) menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik.

Warganegara ikut berperan penting dalam menseleksi calon pemimpin kepala daerah yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun Tindakan yang akan mereka ambil nantinya (Arniti, 2020). Adapun wujud partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah didesa Perapakan kecamatan pemangkat kabupaten sambas adalah sebagai berikut.

1. Pemberian suara

Dalam wujud partisipasi politik masyarakat yang ada didesa perapakan dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan didesa perapakan, dengan tujuan memilih seseorang yang akan ditunjuk melalui pemungutan suara secara musyawarah atau

kegiatan pencoblosan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat ikut serta dalam memberikan partisipasi politiknya melalui pemberian suara secara langsung.

2. Diskusi Politik

Pada beberapa kegiatan masyarakat pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di desa perapakan kecamatan pemangkat kabupaten sambas dimana suatu interaksi yang dilakukan melalui komunikasi langsung atau bertukar pikiran dan membahas tentang kegiatan politik yang akan dilaksanakan pada kegiatan pemilihan umum kepala daerah dimana masyarakat ikut dalam kegiatan rapat dan ikut serta dalam melakukan diskusi politik.

3. Kegiatan kampanye

Serangkaian usaha yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah khalayak ramai yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat melakukan kegiatan kampanye meski dalam jumlah sedikit tidak mengurangi antusias masyarakat untuk melakukan kegiatan kampanye dan mencari dukungan dari masyarakat lain dengan tujuan untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang akan ditunjuk sebagai calon pemimpin. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat melakukan kegiatan kampanye meski dalam keadaan covid 19 dan sedang menjalani protokol kesehatan tidak mengurangi antusias masyarakat untuk melakukan kegiatan kampanye.

4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

Kepentingan yang sama diantara mereka yang membuat mereka menyatu untuk berkoalisi membuat sebuah lembaga atau bergabung dalam organisasi politik atau himpunan orang-orang yang sistematis atau menjadi tim sukses pada saat pemilihan umum bertujuan untuk mencari dukungan kepada masyarakat lain untuk dapat mendukung calon kepala daerah yang akan mereka dukung dan menang dalam pemilihan umum.

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah faktor pekerjaan masyarakat yang tidak dapat ditinggalkan yang cukup mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dan juga faktor Pendidikan masyarakat yang tidak paham tentang pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah, ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin kepala

daerah yang sebelumnya tidak begitu banyak perubahan yang dilakukan membuat masyarakat kurang kesadaran dalam memilih calon pemimpin kepala daerah namun masyarakat tetap antusias dalam melaksanakan kegiatan pemilihan umum meski sebagian masyarakat tidak ikut serta dalam pemilihan umum.

Faktor Pendidikan yang membuat masyarakat tidak mengerti atau kurangnya pemahaman ilmu politik membuat masyarakat tidak memahami bahwa pentingnya pemilihan umum dan juga pekerjaan masyarakat yang tidak dapat ditinggalkan membuat masyarakat tidak dapat ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan juga kebingungan masyarakat dalam visi misi yang tidak sesuai dengan harapan membuat masyarakat kurang kesadaran untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Selanjutnya calon pemimpin daerah memberikan bantuan berupa sembako untuk menarik perhatian masyarakat sembari menyuarakan aspirasi yang akan calon pemimpin daerah sampaikan kepada masyarakat melalui visi misinya untuk kemajuan daerah kedepannya, keadaan politik pada saat proses pemilihan umum kepala daerah berlangsung dengan tertib dan aman melihat antusias masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Pentingnya membangun suatu kredibilitas dan integritas politik calon pemimpin dimana hal tersebutlah yang berpotensi untuk menjamin tingkat partisipasi politik yang memuaskan, selain pencitraan di butuhkan jiwa kepemimpinan yang tidak hanya memikirkan kepentingan golongan (Valiana & Trisiana, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa calon pemimpin daerah salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap calon pemimpin kepala daerah baik ketidakpercayaan terhadap janji-janji kampanye, tidak tertarik dengan visi misi yang ditawarkan sampai adanya ketidakyakinan masyarakat apakah Ketika ia memilih akan memberikan pengaruh atau perubahan. (Liando & M, 2014). Dapat disimpulkan bahwa masyarakat kebingungan dalam visi misi yang disampaikan calon kepala daerah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang akan mereka pilih nantinya dan juga masyarakat tidak memahami arti pentingnya pemilihan umum kepala daerah. Keadaan politik pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah berlangsung aman dan tertib.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat yaitu kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah (Viva, 2019). Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat (Azhar, 2019) yaitu:

1. Peransang Politik

Dimana pemerintah desa Perapakan memberikan dorongan kepada masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah. Dimana pemerintah desa memberikan peransang politik kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik, ikut dalam diskusi politik melalui diskusi secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Karakter Pribadi

Karakter kepedulian seseorang untuk ikut secara aktif dalam pelaksanaan pemilihan umum ikut dalam kegiatan politik, atau suatu kesadaran yang dimiliki masyarakat untuk dapat ikut dalam berpartisipasi pada saat pemilihan umum kepala daerah juga menjadi penentu seseorang untuk berpartisipasi

3. Karakter sosial

Suatu lingkungan seseorang, baik menyangkut sosial dimana masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah atau bergabung dalam suatu kelompok organisasi politik untuk dapat ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan politik .

4. Keadaan Politik

Situasi atau lingkungan politik dan keadaan lingkungan sosial sekitar seorang pemilih yang baik dan kondusif agar pemilih senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Upaya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan

Kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional, dimana jika partisipasi politik tanpa kesadaran politik itu bisa saja terjadi, seperti pada kasus pemilih yang hanya sekedar menggunakan pilihannya, namun sebenarnya ia hanya asal memilih. Namun Sebaliknya, jika partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik maka akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan (Fatwa & Nur, 2016). Suatu kepedulian masyarakat dalam mendukung jalannya suatu sistem politik disuatu daerah, saat rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, maka dibutuhkan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Azhar, 2019). Upaya Partisipasi politik masyarakat yang ada di desa perapakan kecamatan

pemangkat dimana suatu bentuk kepedulian masyarakat dalam melakukan dan ikut serta didalam kegiatan politik atau melakukan pemilihan umum oleh sebab itu peneliti mendapatkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam berpartisipasi politik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda bahwa upaya partisipasi politik yang dilakukan pada saat pemilihan umum menyatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pemilihan umum kepala daerah ialah masyarakat melakukan kegiatan sosialisasi kepala daerah, membentuk relawan demokrasi, memberikan Pendidikan kepada pemilih pemula, dan peran media massa. Wujud partisipasi politik ini menghadirkan demokrasi yang memberikan harapan baru terhadap kedaulatan rakyat (Kusmanto, 2014). Adapun upaya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah didesa Perapakan yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi pemilihan kepala daerah

yang diperlukan untuk memaksimalkan proses sosialisasi pemilihan kepala daerah tentang pentingnya pemilihan umum dalam sebuah negara yang negara demokratis. Dimana pemerintah desa melakukan sosialisasi sejak awal sebelum pelaksanaan pemilihan umum berlangsung untuk memaksimalkan proses sosialisasi dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah.

2. Membentuk relawan demokrasi

Gerakan sosial yang dimaksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi. Dimana pemerintah desa membentuk relawan untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

3. Memberikan Pendidikan bagi pemilih pemula

Dalam upaya melakukan Pendidikan bagi pemilih pemula tidak hanya dilakukan ketika usia pilih. Namun lebih dari itu, Pendidikan bagi pemula dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun, walaupun hanya dilakukan secara umum tetapi diharapkan pemilih pemula dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah.

4. Peran media massa

Salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses pilkada. Terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja penyelenggara pemilu, namun juga menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu peran media massa dalam menyebarkan pamphlet, brosur-brosur atau menyebarkan informasi melalui media sosial untuk memaksimalkan proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa agar masyarakat dapat ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa melakukan sosialisasi pemilihan umum kepala daerah sudah cukup maksimal sejak awal dalam melaksanakan kegiatan pemilihan umum kepala daerah supaya masyarakat dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah, dan membentuk relawan untuk dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu selain itu pemilih pemula diberikan Pendidikan secara umum agar pemilih pemula dapat ikut serta dan dapat berpartisipasi dalam pemilu, peran media massa juga sangat penting dalam proses pemilihan umum dimana pemerintah desa memberikan brosur,serta menyebarkannya di media sosial agar masyarakat dapat ikut serta dalam pelaksanaan pemilu.

KESIMPULAN

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang sudah memiliki kesadaran dalam berpartisipasi politik dan dapat diwujudkan dengan ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan politik walaupun ada masyarakat sebagian yang tidak ikut aktif dalam memberikan partisipasi politiknya. Wujud partisipasi politik masyarakat dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik kepuasan dan ketidakpuasan warga negara yang merujuk kepada tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah masyarakat secara aktif menggunakan hak suaranya dengan persentase perhitungan 71,33% masyarakat desa terlibat dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan ikut serta dalam kegiatan politik, selain itu juga masyarakat

juga ikut dalam kegiatan kampanye dan ikut dalam kegiatan diskusi politik atau bertukar pikiran, selain itu masyarakat juga menjadi tim sukses dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah ialah faktor kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menyangkut tentang pengetahuan masyarakat tentang politik. Upaya partisipasi politik masyarakat di desa Perapakan dalam pemilihan umum kepala daerah dalam melakukan kegiatan sosialisasi, pemerintah desa sudah sangat maksimal dalam menyebarkan pelaksanaan kegiatan pemilu kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*. Bilbiografi.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol 4 No 2.
- Azhar, S. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau. *Journal of Government and Political Studies*, Vol 2 No 2.
- Cholisin, M. S., & Nasiwan. (2012). *Dasar-dasar Ilmu*. Penerbit Ombak.
- Dewantara, J. A., Suhendar, I. F., Rosyid, R., & Atmaja, T. S. (2019). Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5), 400–405.
- Fatwa, & Nur, A. (2016). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Didesa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol 4. No.
- Hadari, N. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, vol 2 no 1.
- Liando, & M, D. (2014). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa tahun 2014. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol 3 No.2, 22.

- Miriam, B. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhaling, A. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro*. Vol 3 No 2.
- Rosana. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIs*, Vol.12 No.
- Sarbani. (2015). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, VIII Nomor.
- Sucipto. (2014). Budaya Politik Lokal dan Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial , MAHAKAM*, Volume 4, 31–44.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *METODE PENELITIAN ILMIAH* (pp. 348–362).
- Sumantri, D. (2018). Sosialisasi Politik Pasangan Calon Kepala Daerah Oleh Kpu Kabupaten Bekasi Pada Pilkada Tahun 201. *Cendikiawan*, 1226.
- Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 115.
<https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41083>
- Viva, J. (2019). *Undang- undang Pemilu 2019*. Genesis Learning.



ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI SISTEM ZONASI TERHADAP PRESTASI BELAJAR

Sulaiman^{1*}, Laila Nurfitriah Lubis¹, Rizky Aditya¹

¹Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak, Indonesia

* imansulaiman137@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas XI SMA Negeri 6 Pontianak. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 88 orang dengan menggunakan analisis regresi. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi, analisis deskriptif dan analisis statistik dengan regresi linier menggunakan SPSS (Social Sciences Program Statistics) versi 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas XI SMA Negeri 6 Pontianak berpengaruh positif. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung (6,863) > t tabel (0,270) dan nilai signifikan (0,000) < 0,05, maka hipotesis (H1) diterima, artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel sistem zonasi terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 6 Pontianak.

Kata Kunci: Sistem Zonasi, Prestasi, Pembelajaran

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the zoning system on learning achievement in class XI SMA Negeri 6 Pontianak. In this study, a sample of 88 people was taken using regression analysis. The data sources obtained are primary data and secondary data. With a quantitative approach. Data collection techniques through interview techniques, observation and documentation. Data analysis techniques used assumption tests, descriptive analysis and statistical analysis with linear regression using SPSS (Social Sciences Program Statistics) version 22.0. The results showed that the zoning system on student achievement in class XI SMA Negeri 6 Pontianak had a positive effect. Based on the results of the calculation, the value of tcount (6.863) > t table (0.270) and a significant value (0.000) < 0.05, then the hypothesis (H1) is accepted, meaning that there is a significant positive effect between the zoning system variable on Student Achievement in Class XI SMA Negeri 6 Pontianak.

Keywords: Zoning System, Achievement, Learning

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan yang semakin maju tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat. Pendidikan adalah hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan (Dewantara et al., 2020). Setiap bangsa dan generasi memiliki dasar dan tujuan pendidikan tertentu. Tentunya dasar dan tujuan itu disesuaikan dengan citacita, keinginan dan kebutuhan. Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang di Dalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru (Slameto, 2010). Sistem Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB (Slamet Santoso, 2010). Dalam pelaksanaan di lapangan, penerapan sistem zonasi ini mendapati berbagai persoalan diantaranya yaitu adanya kondisi peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi memiliki kemampuan pemahaman materi dan motivasi belajar yang cukup rendah Selama ini SMAN 6 Pontianak dikenal sebagai salah satu sekolah favorit yang menerima siswa baru berdasarkan nilai hasil ujian sekolah, prestasi akademik dan non akademik, serta tes tertulis.

Berdasarkan data yang diperoleh menyebutkan terdapat 293 siswa yang diterima melalui sistem zonasi dari total 399 siswa yang diterima pada penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021. Menurut salah satu guru SMAN 6 Pontianak adanya sistem zonasi menyebabkan pemahaman materi peserta didik relatif cukup rendah, dikarenakan tidak meratanya kemampuan pemahaman materi peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi berbeda dengan peserta didik yang masuk melalui sistem prestasi karena peserta didik tersebut benar-benar ditest untuk dapat diterima di SMAN 6 Pontianak. Selain itu tingkat motivasi peserta didik dalam belajar tergolong cukup rendah, hal ini dikarenakan peserta didik malas untuk belajar dan lebih mengandalkan temannya yang masuk dalam jalur prestasi karena dianggap memiliki kemampuan pemahaman belajar yang lebih tinggi dari mereka (Wijaya et al., 2020). Dalam

pembelajaran para peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi kebanyakan kurang memperhatikan penjelasan atau materi yang diberikan oleh guru, karena mereka sibuk dengan kegiatan yang lain seperti mengobrol atau bermain HP, hal ini disebabkan peserta didik pasif baik bertanya maupun mencari di buku pedoman terkait materi yang kurang dimengerti pada saat proses belajar mengajar. Prestasi belajar yang dimiliki para peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi pun tergolong rendah, terlihat dari data nilai hasil ujian tengah semester mata pelajaran Ekonomi, dari 293 peserta didik, peserta didik diantaranya mendapatkan nilai yang belum memenuhi kriteria kelulusan minimal yaitu 69 (Hasibua, 2010).

Zonasi sendiri berasal dari kata zona yaitu kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik, (Hamalik, 2010) dalam bahasa inggris adalah *Zoning*. Pada beberapa negara peraturan zonasi (*zoning regulation*) dikenal juga dengan istilah *land development code*, *zoning code*, *zoning ordinance*, *zoning resolution*, *zoning bylaw*, *urban code*, *panning act*, dan lain-lain. Zonasi sendiri menurut Babcock yang dikutip oleh Korlena dkk didefinisikan sebagai: "*Zoning is the division of a municipality into districts for the purpose of regulating the use of private land*" (A.M Sardiman, 2012). Pembagian wilayah menjadi beberapa kawasan dengan aturan-aturan hukum yang ditetapkan lewat peraturan zonasi, pada prinsipnya bertujuan memisahkan pembangunan kawasan industri dan komersial dari kawasan perumahan. Menurut Barnet peraturan zonasi ini lebih dikenal dengan istilah populer *zoning regulation*, dimana kata *zoning* yang dimaksud merujuk pada pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona pemanfaatan ruang dimana di dalam tiap zona tersebut ditetapkan pengendalian pemanfaatan ruang atau diberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda. Sedangkan menurut KBBI adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (Ahmad Djunaedi, 2011).

Dari pengertian menurut ahli dapat peneliti simpulkan bahwa sistem zonasi adalah pembagian wilayah kedalam beberapa zona. sedangkan dalam pendidikan khususnya pada penerimaan peserta didik baru tahun 2017/2018 sistem zonasi yaitu suatu sistem pembagian zona sekolah yang mengedepankan jarak antara sekolah dengan rumah. Sistem zonasi ini sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 % dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima (Djamarah, 2011).

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah ada Pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui sistem donasi terhadap prestasi belajar siswa pada siswa kelas XI SMA Negeri 6 Pontianak. Siswa yang dijadikan responden secara keseluruhan berjumlah 88 orang dengan kriteria nilai tertinggi di tiap kelas masing-masing.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yaitu peneliti mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dahulu konsep sebagai sebuah variabel yang berhubungan yang berasal dari teori yang sudah ada yang diperoleh oleh peneliti dan kemudian mencari datanya dengan menggunakan kuesioner untuk pengukuran sebuah variable (Arikunto, 2002).

Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan, maka penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*Explanatory Research*) yaitu penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Singarimbun & Efendi, 1995).

Populasi

Populasi adalah Keseluruhan nilai atau sumber data yang mungkin diperoleh melalui hasil perhitungan atau pengukuran, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari dan dianalisa sifat-sifatnya (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 6 Pontianak tahun pelajaran 2020/2021.

Sampel

Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Husein & Riduwan, 2004). Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 88 orang mahasiswa yang memiliki nilai Tinggi, diambil representatif maka dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dalam (Prasetyo et al., 2020) dengan presisi 10%, rumusnya sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diperoleh adalah:

$$n = \frac{750}{1+(100)(0,1)^2} = 88$$

Sumber Data

Jenis data penelitian ada dua, yakni : data primer dan data sekunder. Karena yang diteliti adalah perilaku responden maka data utama yang diperlukan adalah untuk mendukung hipotesis penelitian ini adalah data primer.(Husein & Riduwan, 2004). Data primer adalah data orang pertama yakni data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian adalah para siswa kelas XI SMAN 6 Pontianak tahun pelajaran 2020/2021. Selain data primer, digunakan juga data sekunder untuk mendukung penelitian ini. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, literatur dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.(Supardi, 2005).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi.

- a) Wawancara digunakan untuk mengetahui kondisi dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Data sekunder ini di dapat dari beberapa pihak dalam organisasi.
- b) Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh data deskriptif dalam menguji hipotesis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kusioner tersebut kepada para mahasiswa jurusan administrasi bisnis

Responden kemudian diminta mengisi kuesioner sesuai dengan petunjuk yang telah tersedia.

- c) Studi Dokumentasi. Penelaahan data dengan jalan mengumpulkan informasi-informasi melalui, dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berupa laporan-laporan maupun catatan yang tersedia di organisasi dan sesuai dengan permasalahan.

Data yang sudah terkumpul dari responden diolah dengan skala Likert (Supardi, 2005). Skala Likert umumnya digunakan untuk menilai pendapat atau persepsi dari responden tentang perilaku dan fenomena sosial yang dipakai oleh peneliti dalam variabel penelitian. Analisa diawali dengan data responden dan kemudian diukur tingkat kepentingan responden terhadap indikator-indikator yang diajukan dalam kuesioner dengan menggunakan skala 5 tingkat (Riduwan, 2006b). Menggunakan skala Likert yaitu untuk mengukur sikap dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan item ragu-ragu atau netral karena di khawatirkan jawaban responden akan mengarah ke jawaban tersebut, yang dapat membuat penelitian ini menjadi bias. Oleh karena itu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju (Riduwan, 2006b).

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji instrument agar memberikan hasil sesuai dengan tujuan. Menurut (Supardi, 2005), validitas menunjukkan tingkat instrument penelitian mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dan variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas dilakukan dengan analisa butir. Sebuah instrumen dikatakan valid, jika koefisien korelasinya $\geq 0,3$ dengan $\alpha 0,05$. (Robbins, 2002). Untuk menguji validitas responden digunakan rumus korelasi "*product moment*", dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Dimana:

r = koefisien korelasi

x = skor jawaban tiap item

y = skor total

n = jumlah responden

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti valid

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, berarti tidak valid

Uji Reliabilitas

Menurut (Supardi, 2005) Reliabilitas mengarah pada keajegan suatu alat ukur, di mana tingkat reliabilitas memperhatikan sejauh mana alat ukur dapat diandalkan dan dipercaya. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur alat yang sama.

Menurut (Arikunto, 2002: 160) instrumen dikatakan andal (*reliabel*) apabila memiliki keandalan sebesar 0,60 atau lebih. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan teknik *alpha cronbach* (α), dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \alpha^2 b}{\alpha^2 1} \right]$$

Dimana :

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

$\sum \alpha^2 b$ = jumlah varians butir

$\alpha^2 1$ = varians total

Kriteria indeks reliabilitas menurut (Arikunto, 2002) sebagai berikut :

Tabel.1 Kriteria Indeks Reliabilitas

No.	Interval	Kriteria
1.	< 0,200	Sangat rendah
2.	0,200 – 0,399	Rendah
3.	0,400 – 0,599	Cukup
4.	0,600 – 0,779	Tinggi
5.	0,800 – 1,00	Sangat Tinggi

Sumber : Arikunto, 2002

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas adalah tingkat keandalan alat ukur yang digunakan. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan atau pernyataan dalam mendefinisikan variabel.(Riduwan, 2006a). Kriteria penilaian uji validitas adalah:

1. Apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka item kuesioner tersebut valid.
2. Apabila $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak valid.

Tabel 2. Variabel Sistem Zonasi (X)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Ket
1	.576**	.270	Valid
2	.625**	.270	Valid
3	.698**	.270	Valid
4	.678**	.270	Valid
5	.569**	.270	Valid
6	.453**	.270	Valid
7	.660**	.270	Valid
8	.635**	.270	Valid
9	.616**	.270	Valid
10	.600**	.270	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data Statistik (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai $r \text{ hitung}$ pada pernyataan 1 sampai 10 dalam kuisioner lebih besar dari $r \text{ tabel}$ (0,270). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada dalam indikator Sistem Zonasi (X) adalah valid dan dapat digunakan (Alam, 2019).

Tabel 3. Variabel Prestasi Belajar (Y)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Ket
1	.466**	.270	Valid
2	.739**	.270	Valid
3	.741**	.270	Valid
4	.648**	.270	Valid
5	.667**	.270	Valid
6	.712**	.270	Valid
7	.593**	.270	Valid
8	.630**	.270	Valid
9	.726**	.270	Valid
10	.583**	.270	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data Statistik (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai r hitung pada pernyataan 1 sampai 10 dalam kuisioner lebih besar dari r tabel (0,270). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada indikator Prestasi Belajar (Y) adalah valid dan dapat digunakan.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah Suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kehandalan dalam suatu penelitian. (Singarimbun & Efendi, 1995). Instrumen penelitian yang reliabel jika suatu instrumen berulang kali digunakan untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. (Singgih Santoso, 2000). Cara mengukurnya adalah dengan menghitung koefisien reliabelitas dan membandingkan dengan *cronbach's alpha* yang bernilai 0,6 (lebih besar 0,6 maka reliabel, lebih kecil tidak reliabel). Pada penelitian ini digambarkan dengan *cronbach's alpha* > *cronbach's standard* (0,6).

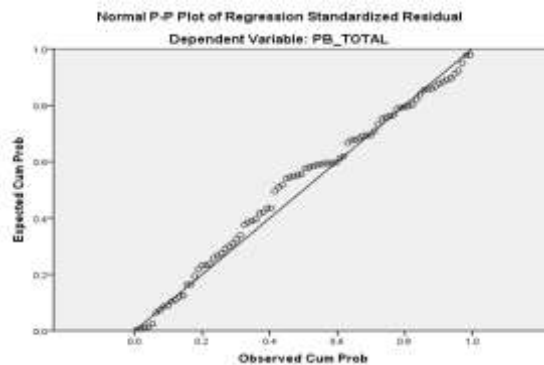
Tabel 4. Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>cronbach's alpha</i>	<i>cronbach's standard</i>	Ket
1	Sistem Zonasi (X)	.804	.60	Reliabel
2	Prestasi Belajar (Y)	.841	.60	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan Data Statistik (2021)

Uji Normalitas

Pengujian distribusi normal ini digunakan *normal probability plot*. Sebaran normal merupakan sebuah pendekatan fungsi dari suatu kumpulan yang memiliki ciri khas, seperti pengamatan yang paling banyak dijumpai memiliki nilai di sekitar nilai tengah (*mean*), pengamatan yang sangat jauh (ke arah kanan dan kiri *mean*) berjumlah sedikit sekali, memiliki pola yang simetris. Menurut Santoso, (2000; 214) Salah satu cara untuk menguji kenormalan adalah *Uji Chi Square*, untuk menentukan apakah sebaran data normal atau tidak, dapat dilihat dan nilai probabilitas dibandingkan dengan α . Jika nilai probabilitas < α berarti data tersebar normal. Gambar-2 Hasil Uji Normalitas *probability plot*.



Gambar 1. Uji Normalitas

Pada Gambar 1 grafik *normal probability plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sehingga model regresi sesuai dengan asumsi normalitas karena memenuhi kriteria normalitas analisis grafik yang pertama yaitu data berdistribusi normal.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen sistem zonasi terhadap variabel dependen prestasi belajar. Adapun bentuk persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

Keterangan:

Y = prestasi belajar

a = *intercept* (konstanta)

b₁ = koefisien regresi untuk X₁

X₁ = komunikasi

e = *error* (nilai residu)

Berdasarkan pengujian menggunakan *software statistic*, maka hasil persamaan regresi linier sederhana dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.787	3.457		1.674	.098
D_TOTAL	.574	.084	.597	6.863	.000

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan tabel model-model persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 5,787 + 0,574 X + e$$

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji-t)

Uji Signifikan Parsial (uji t) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen (Martono et al., 2020). Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun kriteria adalah:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Menentukan t_{tabel} dengan melihat pada $\alpha = 5\%$ yang diperoleh dari *degree of freedom* dengan rumus: $df = n - k$

Keterangan:

$df = \text{degree of freedom}$ (derajat)

n = jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu 88

k = jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu 3 sehingga t_{tabel} dengan sampel 88, probabilitas 5% dan df sebesar 93 adalah 1,66298 Berikut adalah tabel uji t dari *statistic software*:

Tabel 6. Uji Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.787	3.457		1.674	.098
D_TOTAL	.574	.084	.597	6.863	.000

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Pengujian hipotesis untuk variabel sistem zonasi dapat dilihat pada tabel uji regresi linear sederhana dengan penjabaran sebagai berikut Variabel sistem zonasi secara parsial berpengaruh secara positif signifikan terhadap prestasi belajar, hal ini dapat dilihat dari nilai thitung (6.863) > t tabel (0.270) dan nilai signifikan (0,000) < 0,05, maka hipotesis Ho diterima dan Ha ditolak.

KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil olahan data yang peneliti lakukan dapat dilihat dengan pengujian hipotesis untuk variabel sistem zonasi (X) pada tabel uji regresi linear sederhana dengan penjabaran sebagai berikut Variabel sistem zonasi (X) secara parsial berpengaruh secara positif signifikan terhadap prestasi belajar (Y), yaitu dilihat dari nilai thitung (6.863) > t tabel (0.270) dan nilai signifikan (0,000) < 0,05, maka hipotesis Ho diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan ada pengaruh positif yang signifikan variable system zonasi (X) terhadap prestasi belajar (Y) pada siswa kelas XI SMAN 6 Pontianak tahun pelajaran 2020/2021.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M Sardiman. (2012). *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*. Rajawali.
- Alam, S. (2019). Pengaruh Komunikasi, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan". (Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako). *E-Jurnal Katalogis*, 2(1), 135–145.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Rineka

Cipta.

- Dewantara, J. A., Efriani, E., & Sulistyarini, S. (2020). Caring National Identity Through Teacher Contributions in the Border: Pancasila Actionistic Basic Implementation. *Jurnal Basicedu*, 4(3), 649–661. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i3.407>
- Djamarah, S. B. (2011). *Psikologi Belajar*. Rineka Cipta.
- Hamalik, O. (2010). *Proses Belajar Mengajar*. PT Bumi Aksara. Huda.
- Hasibua, M. S. P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara.
- Husein, U., & Riduwan. (2004). *Skala Pengukuran Variabel Penelitian*. Alfabeta Persada.
- Martono, Dewantara, J. A., & Soeharto. (2020). The ability of indonesian language education students in designing lesson plan through teaching practice in school. *Universal Journal of Educational Research*, 8(11), 5489–5497. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081152>
- Prasetyo, W. H., Ishak, N. A., Basit, A., Dewantara, J. A., Hidayat, O. T., Casmana, A. R., & Muhibbin, A. (2020). Caring for the environment in an inclusive school: The Adiwiyata Green School program in Indonesia. *Issues in Educational Research*, 30(3), 2020.
- Riduwan. (2006a). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Muda*. Alfabeta.
- Riduwan. (2006b). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta.
- Robbins, P. S. (2002). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi. Edisi Kelima*. Diterjemahkan oleh: Halida, S.E dan Dewi Sartika, S.S. Jakarta.
- Santoso, Singgih. (2000). *SPSS : Statistik Parametrik*. Elek Media Komputindo.
- Santoso, Slamet. (2010). *Teori Psikologi Sosial*. PT. Rafika Aditama.
- Singarimbun, M., & Efendi. (1995). *Metode Penelitian Survey*. PT. Pustaka LP3ES. Simamora, Bilson.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Rineka Cipta.
- Supardi. (2005). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. UII Press. Suryabrata.
- Wijaya, A. K., Giyono, U., & Adha, M. M. (2020). Kontribusi Pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Model Role
Playing untuk Pengembangan Keterampilan Intelektual Siswa. *Jurnal
Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 130.
<https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41253>